

**KOEKSISTENSI KEBERAGAMAAN DALAM
MASYARAKAT PLURAL:
STUDI KASUS DESA PENDOWOHARJO, SEWON,
BANTUL, D.I YOGYAKARTA**



Oleh :
MUKOTIP
NIM: 22300011013

DISERTASI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Diajukan kepada Program Doktor (S3) Studi Islam
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor dalam
Bidang Studi Islam

YOGYAKARTA
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukotip
NIM : 22300011013
Jenjang : Doktor
Program Studi : Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam

Menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Saya yang menyatakan



Mukotip

NIM: 22300011013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukotip
NIM : 22300011013
Jenjang : Doktor
Program Studi : Studi Islam
Konsenterasi : Studi Islam

Menyatakan bahwa Naskah Disertasi ini bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Saya yang menyatakan



Mukotip

NIM: 22300011013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN

Judul Disertasi : Koeksistensi Keberagamaan dalam Masyarakat Plural: Studi Kasus Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta
Ditulis oleh : Mukotip
NIM : 22300011013
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam (SI)

Telah dapat diterima

**Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 19 Februari 2026

An. Rektor
Ketua Sidang,



Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP.: 197010242001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS/
PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA
PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 12
Desember 2025, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN
PROMOVENDUS/PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN
SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA,
MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS/PROMOVENDA
MUKOTIP , NOMOR INDUK: **22300011013** LAHIR DI **DEMAK**
TANGGAL **12 DESEMBER 1970**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM**
KONSENTRASI **STUDI ISLAM (SI)** DENGAN SEGALA HAK DAN
KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UIN SUNAN
KALIJAGA YOYAKARTA KE-1065**

YOGYAKARTA, 19 FEBRUARI 2026

An. REKTOR /
KETUA SIDANG



Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP.: 197010242001121001

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**



**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : **Mukotip**
NIM : **22300011013**
Judul Disertasi : Koeksistensi Keberagaman dalam Masyarakat Plural: Studi Kasus Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta

Ketua Sidang : Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

Sekretaris Sidang : Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Aziz Muslim, M.Pd.
(Promotor/Penguji)
2. Najib Kailani, M.A., Ph.D.
(Promotor/Penguji)
3. Dr. Nina Mariani Noor, SS.,M.A.
(Penguji)
4. Dr. Suhadi, S.Ag., M.A
(Penguji)
5. Prof. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A.,
Ph.D
(Penguji)
6. Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
(Penguji)



Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari Kamis Tanggal 19 Februari 2026

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) :3,65.....
Predikat Kelulusan : -Pujian (*Cum laude*)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan



Sekretaris Sidang,

Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A.

NIP:19840620201811001

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor :

Prof. Dr. H. Aziz Muslim, M.Pd.



()

Co. Promotor :

Najib Kaelani, M.A., Ph.D.



()

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

“Koeksistensi Keberagaman dalam Masyarakat Plural: Studi Kasus Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta”

Yang ditulis oleh:

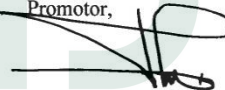
Nama : Mukotip
NIM : 22300011013/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 12 Desember 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Studi Islam.

Wassalamualaikum. Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Januari 2026

Promotor,



Prof. Dr. H. Aziz Muslim, M.Pd.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

“Koeksistensi Keberagaman dalam Masyarakat Plural: Studi Kasus Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta”


Yang ditulis oleh:

Nama : Mukotip
NIM : 22300011013/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 12 Desember 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Studi Islam.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Januari 2026
Co. Promotor,

Najib Kailani, M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

“Koeksistensi Kehidupan Beragama Masyarakat Desa Pendowoharjo Bantul Yogyakarta: Integrasi Tafsir Keagamaan, Pendidikan Dan Ekonomi-Politik”

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukotip
NIM : 22300011013/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 12 Desember 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Studi Islam.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Januari 2026
Penguji,

Dr. Nina Mariani Noor, SS.,M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

“Koeksistensi Keberagaman dalam Masyarakat Plural: Studi Kasus Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta”

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukotip
NIM : 22300011013/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 12 Desember 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk ditujukan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Studi Islam.

Wassalamualaikum. Wr.Wb

Yogyakarta, ²⁶ Januari 2026
Penguji,

Prof. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag.,M.Ag.,M. A.,Ph.D

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

“Koeksistensi Keberagamaan dalam Masyarakat Plural: Studi Kasus Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta”

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukotip
NIM : 22300011013/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 12 Desember 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Studi Islam.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Januari 2026

Penguji,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.

ABSTRAK

Koeksistensi keberagaman dalam masyarakat plural kerap dipersepsikan sebagai kondisi tanpa konflik. Padahal, dalam realitas sosial, perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, dan kepentingan sosial merupakan sumber potensi perselisihan yang tidak dapat dihindari. Disertasi ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu: (1) bagaimana masyarakat Desa Pendowoharjo memahami koeksistensi keberagaman dalam kehidupan sosial sehari-hari, dan (2) mengapa tafsir keagamaan, pendidikan, serta faktor ekonomi-politik berperan signifikan dalam membentuk koeksistensi keberagaman masyarakat plural tersebut. Penelitian ini memposisikan koeksistensi bukan sebagai kondisi statis, melainkan sebagai proses yang melibatkan interaksi, negosiasi, dan relasi sosial-kelembagaan dalam ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat lintas agama, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan mengacu pada kerangka teori pluralisme, koeksistensi dan konsep toleransi untuk membaca dinamika relasi keberagaman di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koeksistensi keberagaman di Desa Pendowoharjo dipahami melalui kombinasi kuat antara kultur lokal yang menjunjung kebersamaan, peran aktif pemerintah desa dalam membuka ruang demokratis, serta praktik tafsir keagamaan yang kontekstual dan tidak subordinatif. Tafsir keagamaan tidak diposisikan secara normatif-dogmatis, melainkan dihadirkan sebagai praktik sosial yang menyesuaikan kebutuhan hidup bersama. Pendidikan formal dan nonformal berperan sebagai medium internalisasi nilai toleransi, sementara faktor ekonomi-politik berfungsi menciptakan akses dan partisipasi yang relatif setara dalam ruang sosial dan keagamaan. Disertasi ini menunjukkan bahwa koeksistensi keberagaman di Pendowoharjo terbentuk melalui proses

pengelolaan tradisi hidup yang saling menghormati perbedaan, bukan melalui penghapusan perbedaan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif bahwa koeksistensi keberagaman di tingkat desa dapat tumbuh secara substantif apabila ditopang oleh tafsir keagamaan yang inklusif, pendidikan yang berorientasi kebersamaan, serta kebijakan publik yang membuka ruang partisipasi lintas agama.

Kata kunci: Koeksistensi Keberagaman, Pluralisme, Tafsir Keagamaan, Pendidikan, Ekonomi-Politik.



ABSTRACT

Religious coexistence in plural societies is often perceived as a condition free from conflict. However, in social reality, differences in beliefs, religious practices, and social interests constitute unavoidable sources of potential tension. This dissertation aims to address two main issues: (1) how the community of Pendowoharjo Village understands religious coexistence in everyday social life, and (2) why religious interpretation, education, and socio-economic-political factors play a significant role in shaping religious coexistence within this plural society. This study conceptualizes coexistence not as a static condition, but as a dynamic process involving interaction, negotiation, and socio-institutional relations within the public sphere. This research employs a qualitative approach using a case study and field research methodology. Data were collected through in-depth interviews with religious leaders, village officials, and interfaith community members, participant observation, and documentary analysis. Data analysis was conducted using a descriptive-interpretative method, drawing upon theoretical frameworks of pluralism, coexistence, and tolerance to examine the dynamics of religious relations at the local level. The findings reveal that religious coexistence in Pendowoharjo Village is understood through a strong combination of local cultural values that emphasize communal solidarity, the active role of the village government in creating democratic spaces, and contextual, non-subordinative practices of religious interpretation. Religious interpretation is not positioned in a normative-dogmatic manner, but rather is presented as a social practice that adapts to the practical needs of shared living. Formal and non-formal education function as key media for internalizing values of tolerance, while socio-economic-political factors serve to create relatively equal access and participation within social and religious spheres. This dissertation demonstrates that religious coexistence in Pendowoharjo is formed through the management of lived traditions that respect difference, rather than through the elimination of

difference. The contribution of this study lies in reinforcing the perspective that religious coexistence at the village level can develop substantively when supported by inclusive religious interpretations, education oriented toward communal harmony, and public policies that open participatory spaces across religious communities.

Keywords: Religious Coexistence; Pluralism; Religious Interpretation; Education; Socio-Economic–Political Factors.



مستخلص البحث

يُفهم التعايش الديني في المجتمع التعدّدي في الغالب على أنّه حالة خالية من النزاع، غير أنّ الواقع الاجتماعي بيّن أنّ اختلاف المعتقدات، والممارسات الدينية، وتباين المصالح الاجتماعية تمثّل مصادر محتملة للصراع لا يمكن تجنّبها. ويهدف هذا البحث إلى الإجابة عن قضيتين أساسيتين: (١) كيف يفهم مجتمع قرية بندووهارجو مفهوم التعايش الديني في الحياة الاجتماعية اليومية، و(٢) لماذا تؤدي التفسيرات الدينية، والتعليم، والعوامل الاقتصادية-السياسية دوراً مهماً في تشكيل التعايش الديني داخل هذا المجتمع التعدّدي. ويضع هذا البحث التعايش الديني لا بوصفه حالة جامدة، بل عملية اجتماعية تتضمن التفاعل، والتفاوض، والعلاقات الاجتماعية-المؤسسية في المجال العام. ويعتمد هذا البحث على المنهج النوعي باستخدام أسلوب دراسة الحالة والبحث الميداني. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات المتعمّقة مع القيادات الدينية، والأجهزة القروية، وأفراد المجتمع من مختلف الأديان، إضافة إلى الملاحظة بالمشاركة، والدراسة الوثائقية. وتم تحليل البيانات تحليلاً وصفيّاً-تفسيريّاً بالاستناد إلى أطر نظرية التعدّدية، والتعايش، ومفهوم التسامح، لفهم ديناميات العلاقات الدينية على المستوى المحلي. وتبيّن نتائج البحث أنّ التعايش الديني في قرية بندووهارجو يُفهم من خلال مزيج قوي بين الثقافة المحلية التي تعلي من شأن قيم الجماعة والعيش المشترك، والدور النشط لحكومة القرية في فتح فضاءات ديمقراطية، إلى جانب ممارسات تفسير ديني سياقي وغير إقصائي. ولا يُنظر إلى التفسير الديني بوصفه خطاباً معيارياً-عقائدياً، بل يُمارَس باعتباره ممارسة اجتماعية تتكيّف مع متطلّبات الحياة المشتركة. وتؤدي التربية النظامية وغير النظامية دوراً وسيطاً في استدماج قيم التسامح، في حين تعمل العوامل الاقتصادية-السياسية على إتاحة قدرٍ نسبيٍّ من تساوي الوصول والمشاركة

في المجالين الاجتماعي والديني. وتُظهر هذه الرسالة أنّ التعايش الديني في بندووهارجو يتشكّل من خلال عملية إدارة التقاليد الحياتية القائمة على احترام الاختلاف المتبادل، لا عبر إلغاء الاختلاف. وتكمن إسهامات هذا البحث في تعزيز المنظور الذي يؤكّد أنّ التعايش الديني على مستوى القرية يمكن أن ينمو بصورة جوهرية إذا استند إلى تفسير ديني شامل، وتربية موجّهة نحو العيش المشترك، وسياسات عامة تفتح المجال أمام المشاركة العابرة للأديان.

الكلمات المفتاحية : التعايش الديني، التعدّدية، التفسير الديني، التربية، الاقتصاد-السياسة.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Žā'	ž	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ	<i>muddah muta 'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَايَيْنٌ	<i>rajul mutafannin muta 'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	A	مَنْ نَصَرَ وَقَاتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	I	كَمْ مِنْ فِئَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
Ḍammah	U	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa sulūs</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	Ā	فَتَاحُ رِزَاقِ مَنَّانٍ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	Ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	Ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah bertemu wāw mati	Aw	مَوْلُودٌ	<i>Maulūd</i>
Fathah bertemu yā' mati	Ai	مُهَيِّمِينَ	<i>Muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li alkāfirīn</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةَ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf Ta' Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزیلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدودة	<i>jiyyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila tā' marbūṭah hidup atau dengan ḥarakah (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan "t" berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fīṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā</i>

H. Kata Sandang alif dan lām atau "al-"

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-tālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḏahab</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan ridha- Nya, sehingga disertasi dengan judul “Koeksistensi Keberagaman dalam Masyarakat Plural: Studi Kasus Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan disertasi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat yang harus ditempuh guna meraih gelar Doktor (S.3) dalam Program Studi *Studi Islam* konsentrasi *Studi Islam* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka peneliti menerima saran dan kritik demi sempurnanya penulisan disertasi ini.

Selesainya disertasi ini berkat bimbingan para promotor dan bantuan dari berbagai pihak, maka dengan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag, MA, M.Phil, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag, M.A selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Rafiq, M.Ag. M.A, Ph.D, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Phil. Munirul Ikhwan selaku Ketua Program Studi S3 Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Aziz Muslim, M.Pd dan Bapak Najib Kailani, S.Fil., M.A., Ph.D selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan karya ilmiah ini serta kritik, saran dan motivasi kepada peneliti sehingga memberikan perubahan yang signifikan dan terselesaikannya penulisan disertasi ini.
7. Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang meluangkan waktu untuk

- memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga dapat diaktualisasikan dalam suatu kehidupan akademik.
8. Kepada Istri tercinta Murtini, anak-anak tercinta yang menjadi penyemangat, Ananda Mutiara Khoirunnisa', Muhammad Akhsanul Fikri, dan Muhammad In'am Jawazi yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian naskah disertasi ini.
 9. Segenap civitas akademika pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, atas bimbingan, pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti selama menempuh jenjang pendidikan program doktor sehingga peneliti berhasil menyelesaikan penulisan disertasi ini.
 10. Sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan saran, dan kritik konstruktifnya terhadap penulisan disertasi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan ribuan terimakasih dan kata maaf atas segala keterbatasan dalam disertasi ini. Oleh karena itu, kritik konstruktif dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga disertasi ini bermanfaat dan memberi kontribusi nyata dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat, terkhusus masyarakat Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis,

Mukotip

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	12
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Kerangka Teori	18
1. Pluralisme	18
a. Pengertian Pluralisme.....	18
b. Jenis dan Tipologi Pluralisme.....	20
c. Model Ideologis: Eksklusif, Inklusif, Multikultural.....	23
d. Relevansi Teori Pluralisme bagi Penelitian (Studi Kasus Desa Pendowoharjo)	28
2. Toleransi	32
3. Koeksistensi Hidup Damai	36
4. Urgensi Tafsir Agama dalam Kehidupan Beragama dan Koeksistensi Sosial	39

F.	Metodologi Penelitian	41
1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
2.	Metode Pengumpulan Data.....	43
3.	Teknis Analisis Data.....	44
G.	Sistematika Pembahasan	45
BAB II KERUKUNAN UMAT BERAGAMA		
DI DESA PENDOWOHARJO.....		
A.	Konsepsi Kerukunan Umat Beragama	47
B.	Ibadah dan Kultur Religiusitas Masyarakat Desa Pendowoharjo.....	53
C.	Persatuan dan Bina Damai dalam Masyarakat Pendowoharjo.....	60
D.	Artikulasi Islam Secara Kontekstual Masyarakat Pendowoharjo.....	65
1.	Artikulasi Islam menurut Nahdlatul Ulama.....	65
2.	Artikulasi Islam menurut Muhammadiyah.....	71
E.	Makna Kerukunan Beragama Perspektif Masyarakat Pendowoharjo	78
F.	Struktur Sosial dan Ruang Keagamaan Islam Desa Pendowoharjo.....	82
BAB III PEMAHAMAN KEAGAMAAN		
MASYARAKAT PENDOWOHARJO.....		
A.	Urgensi Tafsir Keagamaan dalam Membangun Koeksistensi	89
B.	Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Lembaga Pendidikan dalam Membangun Koeksistensi	94
C.	Peran Lembaga Ekonomi dalam Membangun Koeksistensi	99
D.	Peran Lembaga Politik/Pemerintahan dalam Membangun Koeksistensi	109

BAB IV KOEKSISTENSI KEBERAGAMAAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT PENDOWOHARJO	113
A. Motivasi dan Gerakan Inklusifitas Masyarakat Pendowoharjo.....	113
1. Keinginan Bersama Untuk Membangun Kehidupan Damai	113
2. Penghargaan Timbal Balik dalam Kehidupan Masyarakat.....	117
3. Ragam Tradisi Masyarakat Pendowoharjo: Mengeksplorasi Kedalaman Tradisi Berbeda	120
B. Praktek Beragama Inklusif Masyarakat Pendowoharjo ditinjau dari Perubahan Sosial Budaya	126
C. Dinamika dalam Pembangunan Koeksistensi Keberagaman dalam Masyarakat	132
D. Strategi dalam Membangun Koeksistensi Keberagaman di Desa Pendowoharjo	148
E. Relevansi Tafsir Keagamaan, Produksi Pengetahuan, Ekonomi-Politik dalam Membangun Koeksistensi Keberagaman	157
1. Tafsir Keagamaan.....	163
2. Pendidikan	165
3. Ekonomi Politik.....	168
F. Dukungan dan Tantangan dalam Membangun Koeksistensi Keberagaman dalam Masyarakat Plural Desa Pendowoharjo	176
1. Aspek Dukungan	177
2. Aspek Tantangan	181
 BAB V PENUTUP	 191
A. Kesimpulan	191
B. Saran.....	193
C. Rekomendasi Penelitian Lanjutan.....	194

DAFTAR PUSTAKA 197
LAMPIRAN – LAMPIRAN 206
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 224



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi Pluralisme, 23
Tabel 4.1	Persentase jumlah penganut agama di Desa Pendowoharjo, 157



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 2	Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran 3	SK Rektor UIN Sunan Kalijaga tentang Pengangkatan Promotor Penulisan Disertasi
Lampiran 4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
Lampiran 5	Glosarium
Lampiran 6	Daftar Lokasi Masjid dan Musholla di Pendowoharjo
Lampiran 7	Daftar Informan Penelitian
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum konteks penelitian, mulai dari latar belakang munculnya persoalan, fokus dan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan disertasi. Pendahuluan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai arah dan urgensi penelitian tentang *Koeksistensi Keberagamaan Dalam Masyarakat Plural: Studi Kasus Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta* sebagai bagian dari dinamika sosial-keagamaan masyarakat Indonesia yang plural.

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan para sarjana berkaitan dengan agama dan bina damai masih tampak pada kajian permukaan. Narasi yang banyak mereka jelaskan masih tampak simbolik, terbatas pada elit, dan penjelasan-penjelasan yang memframing seremonial keagamaan sebagai bagian dari koeksistensi keberagamaan masyarakat.¹ Sering kali juga penjelasan para sarjana dalam menjelaskan religious koeksistensi berangkat dari pengalaman-pengalaman trauma konflik masa lalu yang terjadi dalam setiap tahapan perjalanan hidup manusia di berbagai belahan dunia.² Hingga saat ini, peristiwa konflik keagamaan

¹ M. Zainuddin, "The Social Construction of Religious Elite on Pluralisme and Interreligious Dialogue in Malang Indonesia," *Journal of Islamic Knowledge* 1, no. 2 (2012): 13–21; Dushka Matevska, "The Relationship between the Political and Religious Elite in Contemporary Macedonian Society," *Politics and Religion Journal* 5, no. 1 (2011): 129–40; Umi Sumbulah, "Islam and Freedom of Religion: Religious Elites Perspectives in Malang, East Java, Indonesia," *IOSR Journal of Humanities And Social Science* 21, no. 6 (2016): 95–102.

² Mohammed Abu-Nimer, "Religion, Dialogue, and Non-Violent Actions in Palestinian-Israeli Conflict," *International Journal of Politics, Culture, and Society* 17 (2004): 491–511; Randi Gressgård, *Multicultural Dialogue: Dilemmas, Paradoxes, Conflicts* (Berghahn Books, 2022); Friday I. Ogbuehi, "Critical Appraisal of Dialogue as a Strategy for Religious Conflict Resolution in Nigeria," *UNIZIK Journal of Religion and Human Relations* 8, no. 2 (2016): 158–74.

terus mengambil tempat dalam pemberitaan publik terutama dalam konteks Timur Tengah, Asia Tenggara dan Indonesia.³ Konflik keagamaan dengan berbagai nuansanya baik politik, sosial dan ekonomi seakan menjadi perbincangan yang tidak kunjung usai. Narasi para sarjana terkait sejumlah upaya rekonsiliasi dan membangun koeksistensi keberagaman di ruang publik terus menjadi fokus para elit politik, sarjana, para intelektual, hingga tokoh-tokoh agama.

Upaya merekonstruksi koeksistensi keberagaman di masyarakat sudah banyak dilakukan oleh para *stakeholder* baik dari jalur kebijakan politik negara, dialog antar umat beragama, hingga upaya menafsir ulang berbagai teks-teks kitab suci. Produk dari hasil upaya tersebut telah melahirkan banyak istilah keilmuan, mulai dari kosmopolitanisme agama dari aspek kebudayaan,⁴ dialog agama dengan berbagai dimensinya baik pada aspek masyarakat maupun para elit,⁵ harmoni sosial keberagaman,⁶ hingga narasi dan konsepsi yang lahir dari arus kebijakan politik negara seperti moderasi keberagaman

³ Jonathan Fox, Patrick James, and Yitan Li, "Religious Affinities and International Intervention in Ethnic Conflicts in the Middle East and Beyond," *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne de Science Politique* 42, no. 1 (2009): 161–86; Isak Svensson, "One God, Many Wars: Religious Dimensions of Armed Conflict in the Middle East and North Africa," *Civil Wars* 15, no. 4 (2013): 411–30; Peter Searle, "Ethno-Religious Conflicts: Rise or Decline? Recent Developments in Southeast Asia," *Contemporary Southeast Asia*, 2002, 1–11.

⁴ Deirdre Meintel and Géraldine Mossière, "In the Wake of the Quiet Revolution: From Secularization to Religious Cosmopolitanism," *Anthropologica*, 2013, 57–71; Maria Rovisco and Sebastian Kim, *Cosmopolitanism, Religion and the Public Sphere* (Routledge, 2014).

⁵ David Tracy, *Dialogue with the Other: The Inter-Religious Dialogue*, vol. 1 (Peeters Publishers, 1990); Abu-Nimer, "Religion, Dialogue, and Non-Violent Actions in Palestinian-Israeli Conflict."

⁶ Agustinus Ufie, Shermina Oruh, and Andi Agustang, "Maintaining Social Harmony Through Historical Learning Based on Local Wisdom of Indigenous Peoples in Maluku," *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 5, no. 1 (2021): 27–36; Herman L. Beck, "A Pillar of Social Harmony: The Study of Comparative Religion in Contemporary Indonesia," in *Modern Societies & the Science of Religions* (Brill, 2002), 331–49.

yang akhir-akhir ini digalakkan oleh banyak negara.⁷ Meskipun demikian, berbagai konsepsi teoritis yang menawarkan pandangan berbeda juga terus berkembang. Konsep seperti konflik keberagamaan,⁸ prasangka negatif,⁹ diskiriminasi keberagamaan dengan basis politik,¹⁰ mayoritas minoritas,¹¹ sampai berbasis etnis seperti kasus Rohingya di Philipina dan kasus Ahmadiyah di Indonesia juga terus menjadi pembahasan publik.

Dari diskusi para sarjana sebagaimana disebutkan di atas, tampak menjelaskan fenomena keberagamaan masih terus berjalan dengan realitas yang tidak sejalan. Penjelasan-penjelasan itu dengan berbagai kecanggihan konsepsi teoritis yang diberikan masih terus menjelaskan dua kutub fenomena keberagamaan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Dialog aksi sudah banyak dilakukan, para elit agama juga sering lalu lalang dalam acara-acara dialog antara agama, pelatihan-pelatihan moderasi terus dilakukan dari berbagai tingkatan masyarakat, namun koeksistensi

⁷ Wahyudi Akmaliah, "The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 1 (2020): 1–24; Yudhi Kawangung, "Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia," *International Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2019): 160–70; Ethan H. Shagan, *The Rule of Moderation: Violence, Religion and the Politics of Restraint in Early Modern England* (Cambridge University Press, 2011).

⁸ Svensson, "One God, Many Wars: Religious Dimensions of Armed Conflict in the Middle East and North Africa."

⁹ Wade C. Rowatt, Tom Carpenter, and Megan Haggard, "Religion, Prejudice, and Intergroup Relations," *Religion, Personality, and Social Behavior*, 2013, 180–202.

¹⁰ Sonia Ghumman et al., "Religious Discrimination in the Workplace: A Review and Examination of Current and Future Trends," *Journal of Business and Psychology* 28 (2013): 439–54; Bob Hepple and Tufyal Choudhury, "Tackling Religious Discrimination: Practical Implications for Policy-Makers and Legislators," 2001.

¹¹ Lori G. Beaman, "Battles over Symbols: The 'Religion' of the Minority versus the 'Culture' of the Majority," *Journal of Law and Religion* 28, no. 1 (2013): 67–104; Jonas R. Kunst et al., "The Vicious Circle of Religious Prejudice: Islamophobia Makes the Acculturation Attitudes of Majority and Minority Members Clash," *European Journal of Social Psychology* 46, no. 2 (2016): 249–59.

keberagamaan itu tampak jauh digapai karena narasi benturan, merendahkan, hingga kebencian keberagamaan terus mengambil tempat di ruang publik Indonesia.¹²

Pada aspek yang berbeda, tampak jargon-jargon besar kota-kota di Indonesia juga mengarah pada upaya membangun ruang-ruang koeksistensi keberagamaan.¹³ Indeks religiousitas masyarakat di berbagai kota setiap tahunnya selalu dirilis, baik oleh kementerian agama sendiri, lembaga survei, hingga perguruan tinggi, menyajikan hasil survei mereka terkait dengan kerukunan umat beragama dan lain sebagainya.¹⁴ Dalam konteks ini juga muncul paradoks-paradoks. Yogyakarta misalnya, memiliki jargon dan mencitrakan diri sebagai *the city of tolerance*.¹⁵ Yuniarto Dwi Sutono, dalam Gelar Potensi Kesenian Masyarakat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Award 2023 menyebutkan bahwa Kota Yogyakarta terbentuk dari berbagai unsur suku, budaya dan latar belakang agama yang beragam, maka toleransi dan sikap saling menghormati satu sama lain harus menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Yogyakarta juga

¹² Hasan Baharun and Robiatul Awwaliyah, "Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi Narasi Islamisme Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 5, no. 2 (2017): 224–43; Mibtadin Mibtadin and Fathol Hedi, "Masjid, Khutbah Jumat, Dan Konstruksi Realitas Keagamaan Di Ruang Publik: Studi Tentang Materi Khutbah Jumat Di Masjid-Masjid Kota Surakarta," *Jurnal Ilmu Dakwah* 40, no. 1 (2020): 40–53.

¹³ Agus Ahmad Safei, "Toleransi Beragama Di Era 'Bandung Juara,'" *Kalam* 10, no. 2 (2016): 403–22; Siti Maharani Chumairah and Ridho Al-Hamdi, "Dinamika Toleransi Di Kota Besar Indonesia: Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan City of Tolerance," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 9, no. 2 (2019): 175–83.

¹⁴ Muh Abas and Pendais Haq, "Indeks Kerukunan Umat Beragama Di Kota Kendari Ditinjau Dari Aspek Hubungan Sosial, Hubungan Keagamaan, Nilai, Dan Peran Pemerintah," *Historical Education Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2016); Arif Gunawan Santoso, Deden Istiawan, and Laelatul Khikmah, "Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Kalimantan Barat," *Intizar* 28, no. 2 (2022): 70–84; Sukestiyarno Sukestiyarno et al., "Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Ditinjau Dari Dimensi Moderasi Beragama," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 8, no. 2 (2022): 177–90.

¹⁵ Muhammad Kamil, "Cultural Tolerance, Diversity and Pluralism: The Recognition of Yogyakarta as the City of Tolerance," *LOGOS (Journal of Local Government Issues)* 1, no. 1 (2018): 85–104.

menjadi salah-satu dari 3 kota kerukunan di Indonesia, namun dari survei berbagai lembaga menunjukkan diskriminasi berdasar agama, ras, perempuan dan kekerasan sosialnya termasuk isu klitih juga masih terus menghantui kota ini.¹⁶ Namun demikian, berbagai elemen mulai dari pemerintah maupun masyarakat terus berupaya untuk menekan angka intoleransi dalam kehidupan di Yogyakarta.

Selain relasi antaragama, kajian koeksistensi keberagamaan juga perlu memperhatikan dinamika internal dalam satu komunitas agama, khususnya relasi kuasa antar kelompok intra-Muslim. Dalam konteks Islam Indonesia, relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas seperti Ahmadiyah, sering kali memperlihatkan ketimpangan akses terhadap ruang sosial, legitimasi keagamaan, dan perlindungan negara. Perbedaan tafsir teologis tidak jarang bertransformasi menjadi relasi kuasa yang menentukan siapa yang dianggap “ortodoks” dan siapa yang ditempatkan pada posisi marjinal. Oleh karena itu, studi koeksistensi yang hanya menekankan harmoni lintas agama berpotensi mengabaikan persoalan ketidakadilan yang terjadi di dalam tubuh umat Islam sendiri.

Dalam banyak kasus, kelompok minoritas intra-Muslim menghadapi tekanan simbolik maupun struktural, baik melalui wacana keagamaan, kebijakan publik, maupun stigma sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa koeksistensi keberagamaan tidak selalu berjalan dalam relasi yang setara, melainkan dibentuk oleh distribusi kuasa yang timpang. Perspektif relasi kuasa menjadi penting agar koeksistensi tidak dipahami secara normatif-ideal, tetapi sebagai proses sosial yang sarat dengan negosiasi, dominasi, dan resistensi.

Sebagai contoh, Kabupaten Bantul Yogyakarta, yang selama ini dikenal dengan kota yang cukup *tolerance* kini tumbuh gerakan-

¹⁶ Saifuddin Saifuddin, “Kekerasan Atas Nama Tuhan (Studi Kasus Kekerasan FPI Yogyakarta),” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (n.d.); Ahmad Putra and Sartika Suryadinata, “Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber,” *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2020); Ismaya Dewi Priyani, “Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Pematangan Nisan Salib Di Kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta,” *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021): 85–100.

gerakan keagamaan kanan yang cenderung menegasi lain, lengkap dengan jaring transnasionalnya.¹⁷ Mereka menumbuh pesat dengan berbagai bentuknya, mulai dari lembaga pendidikan keagamaan, hingga berbentuk gerakan jalanan yang tampak bertindak sebagai polisi keagamaan.¹⁸

Di sisi lain, terdapat pula fenomena unik di Bantul Yogyakarta, tempatnya di Desa Pendowoharjo Sewon Bantul. Desa ini adalah desa yang bermetamorfosa menjadi masyarakat kota. Terletak di pinggiran kota dengan fasilitas yang mulai lengkap. Suatu daerah yang terletak di pinggiran kota, biasanya banyak menghadirkan konflik keagamaan karena terjadi persaingan dan perebutan sumber daya, mulai dari lahan-lahan sumber keekonomian hingga perebutan kekuasaan.¹⁹

Ruang publik dan penguasaannya di pinggiran kota sering kali mereka perebutkan agar nantinya mereka dapat mengoperasikan kekuasaan mereka dengan aman. Biasanya yang mayoritas akan mengeksklusi yang minoritas. Terdapat juga kasus sikap intoleran seperti kasus upaya pembakaran Gereja Baptis Indonesia Saman di Dusun Saman, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (tetangga desa Pendowoharjo) pada tahun 2015 silam.

Menariknya, Desa Pendowoharjo justru tampak sebaliknya. Hal ini tampak dalam beberapa hal berikut ini; *pertama*, kehidupan masyarakat Desa Pendowoharjo yang memiliki beberapa kelompok keagamaan dari Kristen, Hindu dan mayoritas Muslim. Keberagaman di desa ini tampak inklusif yang ditandai dari harmoni interaksi sosial masyarakat agama yang saling menghargai. Salah satu simbol Inklusivitas interaksi ini tampak dari diwakafkannya sebidang tanah muslim untuk pembangunan rumah ibadah Hindu. Peristiwa ini belum ditemukan padanannya dalam konteks relasi agama di Yogyakarta. Hal ini juga menjadi suatu bukti dari kuatnya ikatan primordial dalam

¹⁷ Abd Assegaf, “Gerakan Transnasional Islam Dan Globalisasi Salafi Di Islamic Center Bin Baz Yogyakarta,” *Millah* 16, no. 02 (2017): 147–72.

¹⁸ Hasil observasi awal yang dilakukan pada tahun 2024.

¹⁹ Purnawan Basundoro, “Ringkasan Disertasi Rakyat Miskin Dan Perebutan Ruang Kota Di Surabaya Tahun 1900–1960-An,” *Masyarakat Indonesia* 38, no. 2 (2017): 427–57.

kehidupan masyarakat yang berujung kepada terbentuknya koeksistensi.²⁰

Kedua, Desa Pendowoharjo terletak di pinggiran kota, berada dalam transisi menuju pembentukan kota, dengan basis ekonomi dan kelas menengah yang cukup mapan. Secara teoritis, daerah pinggiran kota menjadi ruang rebutan sumber daya, penguasaan ruang, hingga dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu. Namun di desa ini menunjukkan deskripsi sebaliknya, di mana distribusi ekonomi yang dipandu oleh pemerintah dan stakholder terkait berjalan *smooth* tanpa konflik.²¹ Di desa ini berkembang kelompok terdidik, akses terhadap layanan publik menunjukkan pola yang inklusif dan partisipatif, sementara struktur perekonomiannya relatif merata. Pemerintah memang mencanangkan Desa Pendowoharjo sebagai ruang kesetaraan pertumbuhan ekonomi yang tidak memunculkan disparitas yang tinggi, dan mengupayakan berkurangnya segregasi sosial berbasis ekonomi.²² Dalam konteks tersebut terlihat bahwa pemerintah dengan kebijakan politik-ekonomi berusaha memberikan intervensi yang cukup profesional yang ditandai dengan upaya demokratisasi dan pemberian akses publik yang inklusif.

Ketiga, di Desa Pendowoharjo selain terdapat lembaga-lembaga keagamaan yang berdampingan satu dengan yang lain, bahkan terjadi saling menghadirkan eksistensi satu sama lain melalui wakaf tanah untuk rumah ibadah, juga terdapat lembaga pendidikan keagamaan Islam tradisional. Di desa ini terdapat Pondok Pesantren Annur lengkap dengan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Lembaga-lembaga keagamaan yang menjadi rujukan masyarakat baik secara formal seperti anak-anak mereka sekolah, juga tempat konsultasi, penetrasi normativitas keagamaan melalui majelis taklim dan pengajian keagamaan di masyarakat.²³ Lembaga keislaman tradisional pesantren

²⁰ Hasil observasi awal yang dilakukan pada tahun 2024.

²¹ Hasil observasi awal yang dilakukan pada tahun 2024.

²² Dewi Indrawati, "Analisis Implementasi Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa (Studi Pada Desa Panggungharjo Dan Desa Pendowoharjo Kabupaten Bantul)" (Universitas Gadjah Mada, 2017).

²³ Abd Faiz Aziz, *Dasar-Dasar Dan Pokok Pikiran Sosiologi Agama* (SUKA-Press, 2021).

yang berafiliasi dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama ini,²⁴ berfungsi memberikan tafsir keagamaan terutama keislaman yang dikontekstualisasi pada kehidupan masyarakat Pendowoharjo. Secara spesifik, dapat disebutkan bahwa masyarakat berhasil memahami dan memelihara koeksistensi keberagaman dalam kehidupan antar sesama individu.

Penelitian ini mengangkat *Desa Pendowoharjo* sebagai lokasi studi tidak hanya karena karakteristik sosial yang plural, tetapi juga karena keberadaan pengakuan kelembagaan yang relevan terhadap kualitas relasi antarumat beragama di desa tersebut. Secara normatif, *Pendowoharjo* ditetapkan sebagai *Desa Sadar Kerukunan* melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 693 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa Sadar Kerukunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021. Penetapan ini merupakan bentuk pengakuan formal dari otoritas keagamaan wilayah terhadap praktik kehidupan bersama yang mencerminkan penghormatan terhadap pluralitas agama sebagai kondisi sosial masyarakat. Status *Desa Sadar Kerukunan* menggambarkan bahwa masyarakat tidak hanya hidup berdampingan secara faktual, tetapi telah mampu mengelola perbedaan secara sadar melalui mekanisme sosial yang relatif stabil.

Penetapan tersebut kemudian diperkuat melalui pencanangan resmi yang dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada 29 September 2021, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah. Pencanangan *Desa Sadar Kerukunan* di Pendowoharjo mencerminkan bahwa kerukunan lokal di desa ini diakui sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat moderasi beragama di ruang sosial yang lebih luas.²⁵ Pengakuan kelembagaan semacam ini menunjukkan hubungan timbal balik antara kebijakan pemerintah dan praktik masyarakat, sehingga desa ini tidak

²⁴ Evi Fatimatur Rusydiyah, "Konstruksi Sosial Pendidikan Pesantren: Analisis Pemikiran Azyumardi Azra," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2017): 21–43.

²⁵ Diakses melalui halaman media berita online, <https://www.antaraneews.com/berita/2423709/>

hanya menjadi objek kehidupan plural secara empiris, tetapi juga dianggap relevan secara normatif dalam wacana pembangunan kerukunan dan moderasi beragama. Dengan demikian, pengakuan kelembagaan terhadap Pendowoharjo memperluas makna kerukunan dari sekadar fakta empiris menjadi legitimasi sosial-institusional yang penting untuk dianalisis dalam konteks koeksistensi keberagamaan.

Dalam kerangka teoritik penelitian ini, yang didasarkan pada teori pluralisme, konsep toleransi, koeksistensi hidup damai, status *Desa Sadar Kerukunan* menjadi alasan empiris dan teoritik yang kuat untuk memilih Pendowoharjo sebagai lokasi penelitian. Secara empiris, status tersebut mengindikasikan bahwa fenomena koeksistensi yang terjadi di desa ini bukan sekadar fenomena lokal biasa, tetapi telah menguat secara sosial dan mendapat pengakuan kelembagaan. Secara teoritik, pengakuan tersebut memperkaya analisis tentang bagaimana realitas pluralitas agama dapat dirawat dan dibina melalui interaksi sosial, aturan kelembagaan, dan praktik bersama yang suportif terhadap keberagaman. Karena itu, status *Desa Sadar Kerukunan* bukan hanya menjadi latar empiris, tetapi juga berdampak pada kualitas analisis koeksistensi yang dibangun dalam kajian ini.

Fenomena kehidupan keagamaan di Desa Pendowoharjo, sebagaimana diuraikan sebelumnya, meliputi kuatnya ikatan primordial masyarakat, dukungan kebijakan pemerintah, ketiadaan segregasi sosial berbasis ekonomi, serta keberadaan lembaga pendidikan keagamaan, menjadi dasar bagi penyusunan disertasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya kajian para sarjana sebelumnya mengenai koeksistensi keberagamaan di tingkat masyarakat desa.

Kajian para peneliti terdahulu menunjukkan kecenderungan pada tiga aspek utama. Pertama, sebagian besar penelitian menyoroti koeksistensi keberagamaan dengan titik tolak pada fenomena konflik.²⁶ Kedua, koeksistensi keberagamaan dalam sejumlah

²⁶ Gressgård, *Multicultural Dialogue: Dilemmas, Paradoxes, Conflicts*; Shireen T. Hunter, *The Future of Islam and the West: Clash of Civilizations or Peaceful Coexistence?* (Bloomsbury Publishing USA, 1998); Ali Aboudi Nehme

penelitian cenderung dibahas pada level elit dan bersifat simbolik, karena lebih banyak dipengaruhi oleh wacana negara serta penafsiran terhadap norma-norma keagamaan.²⁷ Ketiga, koeksistensi keberagaman yang berbasis pada kebudayaan.²⁸ Kajian-kajian sebelumnya belum banyak menelaah koeksistensi keagamaan secara holistik, yang mengaitkan antara dimensi penafsiran agama, konstruksi pengetahuan, dan ekonomi-politik dalam satu konfigurasi sosial. Dalam disertasi ini, penafsiran keagamaan dipahami tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga sebagai praktik sosial yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pendowoharjo Yogyakarta.

Disertasi ini didasarkan pada tiga argumen utama. *Pertama*, koeksistensi keberagaman masyarakat plural dipahami secara bersamaan secara kultural baik dari pemerintah, pengetahuan dan tafsir agama yang dikontekskan pada kebutuhan masyarakat sehari-hari. *Kedua*, demokratisasi ruang publik termasuk dalam konteks Desa Pendowoharjo membawa pada inklusivitas interaksi yang mendukung pada upaya memberikan akses yang sama dalam ruang relasi sosial keagamaan (adanya peran dari pemerintah). *Ketiga*, tafsir keagamaan dalam konteks budaya bisa dihadirkan untuk saling menjaga eksistensi agama satu dengan yang lain tanpa harus saling mendudukkan salah satunya dalam ruang yang subordinat dalam ruang publik. Secara singkat, koeksistensi dapat terwujud dari kokohnya primordial

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 Al Jabouri and Naghah Hamid Al-Yasiri, "Marketing Religious Tolerance and Its Role in Peaceful Coexistence between Religions and Its Impact on the Local Economy Is an Applied Study in Iraq," *Ishtar Journal of Economics and Business Studies (IJEBS)* 3, no. 1 (2022): 1–14.

²⁷ Akmaliah, "The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities"; Shagan, *The Rule of Moderation: Violence, Religion and the Politics of Restraint in Early Modern England*; Lathifatul Izzah, Misyrah Ahmadi, and Kurniati Kurniati, "The Map of The Religious Elite Conflict and Resolution Effort," *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19 (2021): 236–68.

²⁸ Cristine H. Legare et al., "The Coexistence of Natural and Supernatural Explanations across Cultures and Development," *Child Development* 83, no. 3 (2012): 779–93; Tzvetan Todorov, "The Coexistence of Cultures," in *Diasporic Philosophy and Counter-Education* (Brill, 2010), 223–32.

masyarakat, dilanjutkan dengan peranan lainnya seperti pemerintah dalam kebijakannya, peran pendidikan, tafsir keagamaan dan sektor kebijakan ekonomi-politik. Tiga argumen ini menjadi hipotesis awal untuk menjawab tujuan rencana penelitian ini dan memberikan perspektif baru bekerjanya Koeksistensi Keberagamaan di Indonesia khususnya di Yogyakarta.

Dalam konteks lainnya, koeksistensi keberagamaan di Desa Pendowoharjo tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kondisi yang harmonis dan bebas dari persoalan. Di balik relasi sosial yang relatif damai, terdapat dinamika tafsir keagamaan yang berinteraksi secara kompleks dengan struktur sosial, budaya lokal, serta kepentingan aktor-aktor keagamaan dan masyarakat. Tafsir agama berperan sebagai kerangka normatif yang memengaruhi cara individu dan kelompok memahami batas-batas interaksi, menentukan sikap terhadap perbedaan, serta merespons kehadiran “yang lain” dalam ruang sosial bersama. Oleh karena itu, praktik koeksistensi tidak lahir secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari proses dialektis antara ajaran normatif agama dengan realitas sosial yang terus berubah.

Dalam praktiknya, perbedaan tafsir keagamaan tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka, tetapi sering kali hadir sebagai ketegangan laten, negosiasi simbolik, dan penyesuaian sosial yang bersifat implisit. Misalnya, terdapat perbedaan pandangan terkait batas toleransi, bentuk partisipasi sosial lintas agama, serta legitimasi tradisi lokal dalam perspektif keagamaan tertentu. Dinamika ini menuntut adanya mekanisme sosial yang memungkinkan perbedaan tersebut dikelola tanpa berujung pada disintegrasi sosial. Peran tokoh agama, struktur informal masyarakat, serta nilai-nilai lokal menjadi faktor penting dalam meredam potensi konflik dan mengarahkan perbedaan tafsir ke arah koeksistensi yang fungsional.

Dengan demikian, penelitian ini tidak bermaksud menampilkan realitas keberagamaan secara normatif-ideal atau sekadar mengedepankan kisah-kisah harmonis. Sebaliknya, kajian ini berupaya mengungkap dinamika yang melandasi koeksistensi keberagamaan, termasuk tantangan, ketegangan, dan strategi adaptasi yang dijalankan masyarakat. Pendekatan ini penting agar koeksistensi

tidak dipahami sebagai kondisi statis, melainkan sebagai proses sosial yang terus dinegosiasikan, dipelihara, dan diuji dalam konteks relasi antarumat beragama yang majemuk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam disertasi ini akan melihat secara spesifik terkait dengan desa Pendowoharjo yang mampu membangun koeksistensi keberagaman dalam konteks masyarakat pinggiran kota yang sedang menumbuh. Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, maka rumusan masalah ini peneliti turunkan dalam dua pertanyaan utama yaitu:

1. Bagaimana koeksistensi keberagaman masyarakat plural dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Mengapa tafsir keagamaan, pendidikan, serta faktor ekonomi-politik berperan dalam membentuk dan mempengaruhi koeksistensi keberagaman masyarakat plural di Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Masyarakat dapat membentuk cara hidup mereka sendiri.²⁹ Masyarakat Pendowoharjo dalam kehidupan sosialnya menghadirkan koeksistensi sosial dalam lingkungan yang beragam bukan sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa interaksi dan proses sosial yang panjang. Dalam konteks yang demikian, penelitian ini memiliki beberapa tujuan guna menjelaskan bangunan koeksistensi sosial keagamaan masyarakat Pendowoharjo terutama dalam konteks dan situasi geografis masyarakat ini berada di pinggiran kota yang selama ini dalam berbagai kajian banyak diidentik dengan masyarakat yang sedang bertumbuh menuju ke kota.

²⁹ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (Open Road Media, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu; *Pertama*, penelitian ini bertujuan menjelaskan proses membangun koeksistensi sosial keberagaman masyarakat Pendowoharjo dalam interaksi kehidupan masyarakat. *Kedua*, penelitian ini bertujuan menjelaskan tafsir dan pengetahuan keberagaman masyarakat plural dikontekskan dalam bangunan interaksi dan idealisasi masyarakat yang mereka inginkan terutama dalam kebutuhan mereka untuk hidup bersama dalam kondisi lapisan dan kelompok masyarakat yang beragam di Pendowoharjo. *Ketiga*, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan faktor lain yang diterminan bagi bangunan koeksistensi masyarakat plural terutama dari aspek kebijakan pemerintah dan ekonomi politik. Yang terakhir menjadi sangat penting untuk menjelaskan intervensi ekonomi politik sebab hal ini nantinya membawa pada penciptaan ruang demokratisasi masyarakat dalam membangun koeksistensi sosial keagamaan di masyarakat desa.³⁰

Adapun kegunaan dari penelitian ini, peneliti rumuskan dalam beberapa kegunaan sebagai berikut; pertama, kegunaan akademik. Kegunaan penelitian dalam kontek ini guna memberikan penjelasan yang relatif baru dari bangunan koeksistensi masyarakat dalam kehidupan keseharuan mereka terutama dalam konteks masyarakat pinggiran kota dan majemuk. Penjelasan baru ini juga berguna bagi menghadirkan referensi perdebatan dan referensi akademik yang juga relatif baru mengenai bangunan sosial keagamaan masyarakat dalam keseharian mereka di daerah pinggiran kota. Dengan demikian secara akademi kegunaan penelitian ini dapat menjadi rujukan, kritik dan diskusi yang berkontribusi bagi bangunan abstraksi ilmu sosial dan masyarakat agama. Kedua, kegunaan dari penelitian ini bagi stakeholder terkait, seperti pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah kondisi koeksistensi masyarakat bisa menjadi percontohan dan rujukan serta kritik atas intevensi pemerintah dalam mendampingi masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dan pengembangan masyarakat secara lebih komprehensif.

³⁰ Christian Dippel, "Forced Coexistence and Economic Development: Evidence from Native American Reservations," *Econometrica* 82, no. 6 (2014): 2131–65.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang koeksistensi agama telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Di Indonesia kajian koeksistensi dapat ditipologikan ke dalam dua bagian kajian yaitu kajian tentang koeksistensi antar warga negara dengan latar belakang perbedaan etnis, dan kajian kedua tentang koeksistensi antar umat beragama. Untuk membatasi pembahasan riset terdahulu, peneliti mengkaji riset sebelumnya yang sesuai dengan objek penelitian ini. Adapun objek penelitian ini yang sesuai dengan riset terdahulu adalah tentang koeksistensi antar umat beragama. Kajian tentang koeksistensi antar umat beragama sendiri sifatnya tidak tunggal. Peneliti memetakan ada beberapa kecenderungan kajian koeksistensi antarumat beragama yang dikaji oleh peneliti sebelumnya.

Pertama, koeksistensi umat beragama berbasis pendidikan. Penelitian Sobirin, menemukan bahwa untuk membangun koeksistensi dan hubungan antaragama maupun etnis di Lasem melalui pendidikan dan distribusi modal, seperti adanya saling belajar antara komunitas Cina dengan Pesantren dan sebaliknya. Hubungan timbal-balik ini membentuk relasi etnis dan agama yang toleran dan inklusif.³¹ Lyn Parker menemukan bahwa di Indonesia terdapat budaya untuk menumbuhkembangkan koeksistensi melalui pendidikan. Ia menemukan di Yogyakarta dan Sumatera Barat terdapat model pengajaran toleransi antar umat beragama sehingga pemahaman siswa tentang toleransi dapat berkembang.³² Dari kajian ini ditemukan bahwa hidup damai dapat diinternalisasikan melalui sistem pendidikan dengan cara mempertemukan dua agama atau dua etnis untuk saling berinteraksi.

Kecenderungan *kedua*, koeksistensi agama melalui budaya lokal. Koeksistensi ini mengisyaratkan adanya keterlibatan aktif antar

³¹ Mohamad Sobirin, "Portraying Peaceful Coexistence and Mutual Tolernace Between Santri and Chinese Community in Lasem," *Walisongo: Jurnal Penelitian dan Sosial Keagamaan*, Vol 25, No. 2, (2017).

³² Lyn Parker, "Religious Education for Peaceful Coexistence in Indonesia?" *South East Asia Research*, 22 (4), (2014): 487–504. <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0231>

komunitas agama dalam suatu tradisi atau budaya tertentu. Penelitian dari M Bjorkhagen mengkaji pelibatan komunitas keagamaan yang berkonflik di Maluku melalui pendekatan budaya sebagai mekanisme rekonsiliasi sosial. Elit lokal maupun pemerintah adalah aktor yang dapat mengupayakan pelibatan hidup damai pasca konflik melalui budaya lokal. Hal sama juga ditemukan oleh M Ridwan dkk.³³ Mengkaji terkait dengan adanya koeksistensi aktif dari komunitas Muslim dan Kristen melalui adat Pela Gandong. Dewi Tika Lestari juga menemukan bahwa budaya musik dapat menjadi kekuatan integrasi kembali masyarakat Maluku yang terpisah karena konflik.³⁴ Dari sini dapat disimpulkan bahwa konflik dapat di atasi apabila ada keterlibatan aktif hidup damai antar umat beragama melalui kearifan lokal.

Selain dapat meredakan konflik, kearifan lokal juga dapat berfungsi untuk meminimalisir konflik antar umat beragama. Caranya adalah adanya keaktifan dari masing-masing kelompok agama dalam suatu budaya tertentu. Setyabudi menemukan bahwa di Ngadas terdapat tiga agama yaitu Islam, Budha, dan Hindu yang hidup secara toleransi koeksistensial. Toleransi koeksistensial ditemukan dalam pengikatan nilai kultural antar pemeluk agama yakni Suku Tengger.³⁵ Begitu juga penelitian Galang Asmara yang menemukan adanya kehidupan harmonis dan toleransi aktif dalam umat beragama di Lombok. Koeksistensi hidup damai di antara umat beragama Lombok disatukan dalam nilai kesukuan yang diperkuat melalui dalil agama seperti al-Quran dan Hadist.³⁶ Selain dipayungi oleh nilai kesukuan,

³³ M. Ridwan, Sulaeman Sulaeman, Ali Nurudin et al. "Cross-Religious Rituals in the Moluccas, Indonesia," 24 January 2023, PREPRINT (Version 1) available at *Research Square* [<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2497867/v1>]

³⁴ D. T. Lestari, "Membangun Harmoni Sosial Melalui Musik Dalam Ekspresi Budaya Orang Basudara Di Maluku." *Jurnal Panggung*, 3(3), (2020): 365-397.

³⁵ Muhammad Nur Prabowo Setyabudi, "Satu Adat Tiga Budaya: Dinamika Toleransi Agama dan Budaya Masyarakat Suku Tengger Ngadas", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 24, No. 2, 2022.

³⁶ Asmara, Galang. "The principles of religious tolerance and harmony among the people of Sasak tribe in Lombok island, Indonesia." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21.1 (2018): 1-6.

koeksistensi hidup damai tampak dalam keterlibatan aktif komunitas agama dalam budaya seperti yang ditemukan oleh Ahmad Zamakshari di Kota Bekasi. Umat agama Kristen dan Islam hidup secara koeksisten dengan cara melibatkan diri dalam ruang kebudayaan seperti *tepo seliro, lung tinulung, saling hantar makanan, rebug, slametan*, dan lain sejenisnya.³⁷

Kecenderungan selanjutnya adalah koeksistensi atau hidup damai inter-agama di Indonesia. Penelitian Andi Ahmad Rukka Haryadi menemukan adanya koeksistensi atau hidup damai inter umat beragama Sunni dan Syiah di Sendangsari Jepara. Kesadaran kewargaan dan elit setempat berpengaruh terhadap keharmonisan Sunni dan Syiah. Selain itu juga, adanya kesadaran kognitif dari dua komunitas tersebut yaitu urusan agama menjadi urusan pribadi, sedangkan urusan kewargaan merupakan urusan bersama.³⁸ Hal yang sama juga ditemukan oleh Ahmad Habiburrahman Aksa yang menemukan adanya harmoni sosial antara komunitas Sunni dan Syiah di Banjarnegara, Jepara. Kedua komunitas tersebut mengimplementasikan keharmonisan secara kultural seperti gotong royong, slametan, dan peringatan hari besar yang dilaksanakan secara bersama-sama.³⁹

Apa aspek yang lain, terdapat pula studi tentang pengelolaan budaya damai atau toleransi dalam kehidupan sosial seperti kajian dalam buku yang ditulis oleh M. Abzar Duraesa. Kajian ini berangkat dari permasalahan maraknya kasus intoleransi, ekstremisme, dan pandangan negatif terhadap perbedaan di Indonesia khususnya Kota Samarinda. Abzar menjelaskan bahwa diskursus pemikiran pluralisme agama di Kota Samarinda belum mampu mewarnai pergolakan pemikiran keislaman secara umum, dan

³⁷ Zamakshari, Ahmad. "Kontestasi Umat Beragama (Studi tentang Perdamaian dan Ketegangan Islam-Kristen di Kota Bekasi)." *Tatar Pasundan* 13.2 (2019): 299-334.

³⁸ Haryadi, Andi Ahmad Rukka. "Menelaah Koeksistensi Damai antara Komunitas Sunni dan Syiah di dusun Sendangasari Kabupaten Jepara." *LITERATUS* 2.2 (2020): 199-210.

³⁹ Ahmad Habiburrahman, "Harmoni Sosial Sunni-Syi'i: Studi Ketahanan Sosial terhadap Konflik Sunni-Syi'i di Desa Banjarnegara, Bangsri, Jepara", *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.

tentunya belum bisa diterima semua kalangan, baik pemerintah, tokoh-tokoh agama, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Dapat disimpulkan bahwa dinamika pemikiran pluralisme agama di Samarinda belum mampu membangun simpati dan pengaruh positif di kalangan mayoritas masyarakat muslim yang justru dari merekalah misi dan tujuan gerakan pluralisme agama mestinya dimulai. Oleh karena itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa pemikiran pluralisme agama belum mampu memaksimalkan strategi dan pendekatan yang lebih menjanjikan di masa yang akan datang.⁴⁰

Buku yang ditulis oleh Umi Sumbulah dan Nurjanah, mengeksplorasi terkait dengan Pluralisme Agama. Secara umum, tulisan ini menjelaskan pluralisme perspektif agama di Indonesia (Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Konghucu). Sumbulah dan Nurjanah mengkomposisikan kajian ini dalam tiga simpulan yaitu: *Pertama*, pemahaman elit agama terhadap makna pluralisme agama tampak sangat beragam. Mereka yang setuju pada pluralisme memahami dengan sikap yang sangat positif dan terbuka, terlibat dalam banyak forum ilmiah serta kegiatan-kegiatan dialog lintas budaya dan agama. Sementara mereka yang menolak pluralisme memahami dalam pengertian yang khas, bersifat teologis didefinisikan sebagai paham yang mengajarkan relativisme kebenaran agama. *Kedua*, pola kerukunan antarumat beragama dimaknai secara berbeda-beda dalam lingkungan sosial, yang meliputi latar belakang pendidikan, interaksi sosial dan pengetahuan keagamaan. *Ketiga*, dialog antarumat beragama merupakan instrumen penting dalam membangun jembatan komunikasi lintas iman guna meminimalisasi potensi benturan dan konflik keagamaan. Melalui mekanisme dialog, umat beragama tidak hanya berupaya mencari titik temu dalam perbedaan keyakinan, tetapi juga mengonstruksi ruang sosial yang memungkinkan terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Dalam konteks ini, keterbukaan dan transparansi, kesadaran terhadap keragaman, sikap kritis terhadap eksklusivisme keagamaan, serta

⁴⁰ H. M. Abzar Duraesa, *Diskursus Pluralisme Agama Di Indonesia*, ed. oleh Muzayyin Ahyar, *Ar-Ruzz Media*, vol. 1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 1-160

pemahaman yang mendalam terhadap sistem kepercayaan, ritus, dan simbol-simbol keagamaan masing-masing menjadi fondasi utama bagi terwujudnya koeksistensi yang konstruktif. Dengan demikian, perbedaan agama bukan lagi dipandang sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai realitas sosial yang niscaya dan dapat dikelola secara dialogis menuju kehidupan bersama yang damai.⁴¹

Dari beberapa kecenderungan kajian koeksistensi atau hidup damai antar umat beragama belum ada yang membahas tentang produksi pengetahuan dan tafsir agama yang menyangkut koeksistensi tersebut. Perbedaan penelitian di atas dengan peneliti terletak pada aspek filosofis yang mendasari koeksistensi atau hidup damai yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya. Kecenderungan para peneliti sebelumnya terletak pada aspek aksiologis yang tampak dalam tindakan keseharian masyarakat umat beragama seperti dalam pendidikan maupun kearifan lokal. Dengan demikian, fokus kajian ini dapat memberi perspektif baru tentang koeksistensi atau hidup damai dari sudut pandang tafsir agama dan produksi pengetahuan.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga kerangka teoretik untuk menganalisis koeksistensi kehidupan beragama di Pendewoharjo Bantul. Ketiga konsep teoretik ini di antaranya adalah pluralisme, toleransi dan koeksistensi. Konsep teoretik ini bersifat saling mendukung untuk menganalisis objek dalam penelitian ini.

1. Pluralisme

a. Pengertian Pluralisme

Dalam kajian sosial-keagamaan, istilah pluralisme kerap disamakan secara keliru dengan pluralitas atau toleransi, padahal ketiganya memiliki tingkatan makna yang berbeda. Pluralitas (*plurality*) merujuk pada fakta keberagaman, sekadar adanya perbedaan agama, etnis, atau budaya dalam suatu

⁴¹ Umi Sumbulah dan Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, ed. oleh Muhammad In'an Esha, UIN Maliki Press (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 1-258

masyarakat.⁴² Sementara toleransi merupakan sikap menahan diri untuk tidak mengganggu atau mencampuri keyakinan orang lain, namun tidak selalu disertai keterlibatan aktif dalam menjalin relasi. Adapun pluralisme adalah tingkatan yang lebih tinggi, yakni kesediaan untuk terlibat secara positif dalam perbedaan, membangun interaksi, dan menjadikan keragaman sebagai kekuatan sosial, bukan sumber ancaman.⁴³

Menurut Diana L. Eck, pluralisme bukan sekadar keberadaan keragaman (*diversity*) atau sikap membiarkan perbedaan (*tolerance*), melainkan “*energetic engagement with diversity*”, keterlibatan aktif yang dilakukan secara sadar untuk membangun relasi antar kelompok yang berbeda.⁴⁴ Dengan demikian, pluralisme tidak hanya mengakui perbedaan, tetapi juga membangun komunikasi, kerja sama, dan rasa memiliki dalam ruang sosial yang sama.

Senada dengan itu, Bhikhu Parekh mendefinisikan pluralisme sebagai suatu kerangka normatif yang memungkinkan berbagai kelompok mempertahankan identitasnya masing-masing, sekaligus berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Bagi Parekh, inti pluralisme terletak pada pengakuan dan penghormatan timbal balik (*mutual respect*).⁴⁵ Masyarakat plural tidak boleh memaksa homogenitas, tetapi juga tidak membiarkan isolasi; pluralisme menuntut adanya pertukaran nilai antar kelompok tanpa kehilangan jati diri.

Berbeda dari keduanya, Charles Taylor menekankan aspek pengakuan identitas (*politics of recognition*) dalam pluralisme. Baginya, konflik sosial seringkali tidak muncul karena perbedaan substansial, tetapi karena tidak adanya pengakuan

⁴² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1998), 177.

⁴³ Diana L. Eck, *A New Religious America: How a “Christian Country” Has Become the World’s Most Religiously Diverse Nation* (San Francisco: Harper San Francisco, 2001), 70.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (London: Palgrave Macmillan, 2006), 6–7.

terhadap martabat kelompok lain. Pluralisme yang sejati hanya tercapai ketika setiap kelompok merasa diakui keberadaannya secara setara, bukan sekadar ditoleransi secara minimal.⁴⁶

Dalam perspektif Islam, Abdulaziz Sachedina mengemukakan bahwa pluralisme merupakan bagian inheren dari ajaran tauhid yang menghormati kemanusiaan universal. Ia menyebut pluralisme sebagai “*ethical mandate in Islam*”, yakni mandat etis untuk hidup damai bersama pemeluk agama lain berdasarkan prinsip ‘*adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *ta’awun* (kerja sama). Dengan demikian, pluralisme dalam Islam bukan kompromi teologis, melainkan komitmen sosial untuk menjaga perdamaian dan keadilan antarumat manusia.⁴⁷

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pluralisme bukan sekadar keadaan, melainkan sikap aktif dan komitmen sosial untuk membangun kehidupan bersama dalam perbedaan. Pluralisme menuntut pengakuan, interaksi, dan kerja sama, bukan hanya pembiaran terhadap perbedaan. Oleh karena itu, pluralisme yang ideal adalah pluralisme yang dihidupi dalam praktik keseharian, sebagaimana realitas koeksistensi keberagaman yang tampak dalam masyarakat desa seperti Pendowoharjo.

b. Jenis dan Tipologi Pluralisme

Dalam kajian pluralisme kontemporer, para ilmuwan sosial umumnya memetakan pluralisme ke dalam beberapa jenis dan tahapan keterlibatan sosial untuk membedakan keberagaman yang bersifat statistik, sosial, maupun normatif.⁴⁸ Perbedaan ini penting untuk menganalisis posisi suatu masyarakat dalam spektrum pluralisme, apakah keberagaman di sana sekadar fakta

⁴⁶ Charles Taylor, *Multiculturalism and “The Politics of Recognition,”* ed. Amy Gutmann (Princeton: Princeton University Press, 1992), 25–26.

⁴⁷ Abdulaziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 15–16.

⁴⁸ Steven Vertovec, “Super-Diversity and Its Implications,” *Ethnic and Racial Studies* 30, no. 6 (2007): 1025–1054.

demografis atau sudah menjadi praktek sosial yang bernilai fungsional.

1) Pluralisme Pasif dan Pluralisme Aktif

Pluralisme pasif mengacu pada situasi ketika keberagaman hadir tetapi tidak dikelola secara sadar. Individu dan kelompok berbeda hidup berdampingan dalam ruang geografis yang sama tanpa konflik terbuka, namun juga tanpa interaksi mendalam.⁴⁹ Dalam banyak masyarakat urban, pluralisme pasif muncul karena anonimitas sosial, orang dari berbagai kelompok bisa tinggal berdekatan secara fisik, namun tidak memiliki ikatan emosional atau solidaritas sosial. Relasi mereka bersifat netral; tidak bermusuhan, tetapi juga tidak berteman. Dalam kondisi seperti ini, perdamaian lebih bersifat negatif, karena tidak lahir dari kesadaran kolektif, melainkan sekadar ketidakpedulian.⁵⁰

Sebaliknya, pluralisme aktif menggambarkan kondisi ketika keberagaman dipelihara secara sadar melalui interaksi, dialog, dan kerja sama. Pluralisme aktif tidak sekadar “hidup berdampingan”, tetapi “hidup bersama” dengan keterlibatan emosional dan fungsional. Dalam masyarakat pedesaan seperti di Jawa, pluralisme aktif sering muncul melalui panggilan budaya seperti gotong royong, ronda malam, tradisi slametan, dan musyawarah kampung. Kegiatan sosial ini menciptakan ruang interaksi lintas agama yang berulang, sehingga hubungan antarwarga dibangun bukan atas dasar doktrin agama, tetapi atas dasar kekerabatan sosial (social kinship).

2) Tahapan Pluralisme Sosial: Dari Toleransi ke Interdependensi

⁴⁹ Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, 196–97.

⁵⁰ Johan Galtung, “Violence, Peace, and Peace Research,” *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 183–186.

Pluralisme juga dapat dipahami sebagai proses bertahap yang bergerak dari tingkat paling minimal hingga paling ideal. Secara umum, dapat dipetakan dalam tiga tahapan:⁵¹

- a) Toleransi (Tolerance) — Tahap paling mendasar, di mana keberagaman diterima dalam bentuk pengendalian diri. Kelompok berbeda tidak mengganggu atau menyerang satu sama lain, namun belum menjalin relasi. Perdamaian di tahap ini bersifat defensif, bukan konstruktif.
- b) Koeksistensi (Coexistence) — Tahap ketika keberagaman dijalankan dalam bentuk fungsi sosial bersama, meskipun belum sepenuhnya saling membutuhkan. Masyarakat saling membantu dalam urusan praktis seperti kematian, hajatan, panen, atau keamanan lingkungan. Pada tahap ini, agama ditarik ke ranah privat, sementara urusan sosial menjadi ruang publik bersama.
- c) Interdependensi (Interdependence) — Tahap tertinggi, di mana perbedaan bukan hanya diterima, tetapi dijadikan dasar untuk saling bergantung secara sistematis. Kelompok mayoritas dan minoritas saling menopang secara ekonomi, budaya, dan politik. Mereka menyusun struktur kepemimpinan bersama, membentuk jaringan sosial lintas identitas, bahkan merumuskan norma bersama yang mengatur keberagaman.⁵²

Posisi koeksistensi keberagaman di Desa Pendowoharjo dapat dianalisis dalam spektrum ini. Jika interaksi antarpemeluk agama bukan hanya ritualistik atau seremonial, tetapi telah menyentuh pengelolaan kepentingan bersama secara struktural,

⁵¹ Eck, *A New Religious America...*, 69–72.

⁵² Tariq Modood, *Multiculturalism: A Civic Idea* (Cambridge: Polity Press, 2007), 89–90.

maka bentuk pluralisme di sana dapat dikategorikan menuju tahap interdependensi fungsional.

c. Model Ideologis: Eksklusif, Inklusif, Multikultural

Selain dilihat dari tingkat interaksi, pluralisme juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk orientasi ideologis masyarakat terhadap perbedaan:⁵³

Tabel 1.1
Klasifikasi Pluralisme

Model	Ciri Utama	Risiko / Potensi
Eksklusif	Mengakui keberadaan orang lain, tapi meyakini hanya kelompoknya yang paling benar	Rentan superioritas agama mayoritas
Inklusif	Mengakui bahwa kelompok lain juga memiliki kebenaran, namun ditafsir melalui perspektif dominan	Risiko asimilasi paksa
Multikultural / Egaliter	Menghormati setiap identitas tanpa menuntut penyatuan keyakinan	Potensi koeksistensi produktif

Dalam masyarakat pedesaan di Jawa, model inklusif-egaliter sering muncul bukan karena wacana teologis, tetapi karena kearifan budaya lokal yang berbasis *tepa selira*, *rukun*, dan *guyub*. Dengan kata lain, pluralisme di banyak desa bukan lahir dari kesadaran intelektual, tetapi dari habitus sosial yang diwariskan secara budaya.

1. Prinsip-Prinsip Pluralisme

Pluralisme bukan hanya realitas demografis, tetapi juga komitmen etis dan praksis sosial yang dibangun di atas sejumlah prinsip dasar. Para pemikir seperti Charles Taylor, Bhikhu Parekh, dan Diana L. Eck menegaskan bahwa pluralisme hanya dapat berfungsi secara konstruktif

⁵³ Paul F. Knitter, *Introducing Theologies of Religions* (Maryknoll: Orbis Books, 2002), 23–26.

apabila didukung oleh nilai-nilai normatif yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, terlepas dari perbedaan keyakinannya. Secara umum, terdapat empat prinsip utama yang menjadi fondasi pluralisme, yaitu pengakuan, kesetaraan, keadilan relasional, dan dialog/perjumpaan.

a) Pengakuan (*Recognition*)

Prinsip pertama dari pluralisme adalah pengakuan atas eksistensi, martabat, dan identitas kelompok lain. Charles Taylor menyebut pengakuan sebagai bagian dari *politics of recognition*, yaitu kebutuhan mendasar manusia untuk dihormati bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai anggota dari suatu komunitas identitas. Dalam konteks pluralisme, pengakuan berarti bahwa setiap kelompok agama memiliki hak untuk hadir di ruang publik tanpa harus menyembunyikan keyakinannya.⁵⁴ Pengakuan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga emosional dan simbolik, misalnya melalui keterlibatan dalam acara desa, penggunaan tempat ibadah secara terbuka, atau penyebutan agama lain dalam doa bersama. Tanpa pengakuan, relasi antar kelompok akan berlangsung dalam pola dominasi atau pengabaian.

b) Kesetaraan (*Equality*)

Pluralisme hanya dapat berjalan apabila seluruh kelompok yang berbeda ditempatkan dalam posisi setara, baik secara hukum maupun sosial. Kesetaraan bukan berarti setiap kelompok harus memiliki jumlah yang sama, tetapi memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi di ruang publik. Dalam masyarakat desa seperti Pendowoharjo, prinsip kesetaraan dapat ditemukan dalam pembagian peran sosial tanpa mempersoalkan agama, misalnya pemilihan ketua RT atau panitia kegiatan desa yang

⁵⁴ Taylor, *Multiculturalism and "The Politics of Recognition."*

tidak selalu berasal dari kelompok mayoritas. Kesetaraan penting untuk mencegah munculnya hierarki agama dominan yang menempatkan agama mayoritas sebagai pemilik otoritas penuh terhadap definisi moral dan sosial.

c) Keadilan Relasional (*Fairness*)

Berbeda dengan keadilan prosedural yang bersifat formal, keadilan relasional menekankan pentingnya keadilan dalam interaksi sosial. Prinsip ini memastikan bahwa hubungan antar kelompok tidak bersifat eksploitatif atau paternalistik. Bhikhu Parekh menegaskan bahwa keadilan dalam masyarakat plural berarti setiap kelompok dihormati sesuai dengan konteks kebutuhan dan posisinya, bukan sekadar diperlakukan “sama” secara kaku. Dalam masyarakat dengan mayoritas-minoritas, keadilan relasional mengharuskan perlindungan ekstra terhadap kelompok yang secara struktural rentan, sekaligus mendorong pemberdayaan kemandirian mereka tanpa menciptakan ketergantungan. Dengan demikian, pluralisme tidak hanya soal hidup berdampingan, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa terintimidasi atau termarginalkan.

d) Dialog dan Perjumpaan (*Engagement*)

Prinsip terakhir adalah dialog aktif dan perjumpaan berkelanjutan. Diana L. Eck menyebut pluralisme sebagai “the energetic engagement with diversity”, yang berarti pluralisme tidak mungkin terwujud tanpa adanya keterlibatan sosial yang intensional. Dialog tidak harus selalu berbentuk diskusi formal lintas agama; dalam konteks pedesaan, dialog bisa hadir melalui kerja bakti bersama, arisan kampung, ronda malam, hingga saling mengunjungi saat perayaan keagamaan. Yang terpenting bukan bentuknya, tetapi kesediaan untuk bertemu, menyapa, dan berinteraksi

secara wajar tanpa kecurigaan. Tanpa dialog, perbedaan hanya akan bertahan sebagai stereotip, bukan relasi.

Dengan demikian, pluralisme yang ideal bukan hanya keberadaan agama-agama berbeda dalam satu ruang sosial, tetapi relasi yang dibangun melalui pengakuan, kesetaraan, keadilan relasional, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan bersama. Keempat prinsip ini akan menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik koeksistensi keberagaman di Desa Pendowoharjo, apakah telah memenuhi syarat pluralisme yang substantif, atau masih berada dalam bentuk minimal seperti toleransi pasif.

2. Pluralisme dalam Konteks Komunitas Lokal / Pedesaan

Dalam konteks komunitas local, terutama masyarakat pedesaan di Indonesia, pluralisme tidak selalu hadir dalam bentuk wacana teoretis atau diskursus intelektual sebagaimana dibahas dalam literatur akademik. Sebaliknya, pluralisme di tingkat akar rumput lebih sering berwujud dalam praktik sosial sehari-hari yang dijalankan tanpa banyak perdebatan konseptual.⁵⁵ Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara pluralisme berbasis wacana dan pluralisme berbasis praktik sosial.

a) Pluralisme Berbasis Wacana dan Pluralisme Berbasis Praktik Sosial

Pluralisme berbasis wacana umumnya berkembang di ruang diskursif formal, seperti forum akademik, dokumen kebijakan, atau dialog antaragama yang diselenggarakan oleh institusi. Dalam model ini, pluralisme dipahami melalui bahasa argumentatif, misalnya melalui tafsir ayat-ayat toleransi, deklarasi kebebasan beragama, atau

⁵⁵ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), 211–12.

perjanjian antar tokoh agama.⁵⁶ Namun, pluralisme berbasis wacana sering kali tidak secara otomatis menjangkau masyarakat akar rumput, karena bersifat elitis dan normatif.

Sebaliknya, pluralisme berbasis praktik sosial ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, di mana keterlibatan lintas agama berlangsung secara alamiah tanpa perlu penjelasan teologis panjang. Seseorang bisa membantu tetangga berbeda agama membangun rumah, menjaga anak, atau ikut berjaga malam tanpa mempertanyakan perbedaan keyakinan mereka. Pluralisme semacam ini tidak lahir dari kesepakatan intelektual, tetapi dari kesadaran relasional berbasis kedekatan hidup. Dengan kata lain, masyarakat desa sering kali “tidak membicarakan pluralisme, tetapi mempraktikkannya”.

b) Koeksistensi Komunal: Harmoni tanpa Dialog Teologis

Berbeda dengan pluralisme versi akademik yang sering menekankan pentingnya dialog teologis atau interfaith dialogue, masyarakat pedesaan justru sering menciptakan harmoni tanpa memerlukan perbincangan doktrinal. Dalam komunitas seperti Desa Pendowoharjo, interaksi lintas agama tidak selalu dilakukan melalui forum resmi, melainkan melalui solidaritas keseharian seperti membantu panen, menjaga keamanan lingkungan, atau menghadiri acara keluarga lintas agama.⁵⁷

Koeksistensi semacam ini bisa disebut sebagai “toleransi diam-diam” (*silent tolerance*) atau “kesadaran sosial bawah-sadar”, yakni bentuk penerimaan tanpa verbalitas. Yang dijaga bukan

⁵⁶ Knitter, *Introducing Theologies of Religions*, 47–49.

⁵⁷ Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, 212–

kesepakatan teologis, tetapi rasa rukun (kerukunan) sebagai nilai bersama. Dalam tradisi Jawa, prinsip tepa selira, rukun agawe santosa, dan aja gawe-gawe menjadi filter sosial yang mengatur perbedaan tanpa harus memperdebatkannya. Harmoni lebih dipertahankan melalui pengendalian diri daripada argumen dogmatis.

c) Gotong Royong sebagai Basis Pluralisme Kultural

Salah satu pilar utama pluralisme pedesaan adalah gotong royong. Di banyak desa di Jawa, aktivitas seperti kerja bakti membersihkan jalan, ronda malam, perbaikan rumah, panen, hingga penggalangan dana sosial dilakukan tanpa membedakan agama. Gotong royong bukan hanya kerja kolektif, tetapi juga ritual sosial yang menetralsir perbedaan. Dalam kerangka pluralisme kultural, gotong royong dapat dilihat sebagai mekanisme sosial untuk membangun interdependensi, di mana setiap individu, baik mayoritas maupun minoritas, merasa memiliki peran dan dihargai kontribusinya.

Melalui gotong royong, masyarakat desa mendefinisikan ulang identitas dari “umat agama” menjadi “warga kampung”. Identitas sebagai warga sering lebih kuat daripada identitas sebagai penganut agama tertentu. Seorang penganut agama minoritas yang aktif dalam ronda malam mungkin lebih dihormati daripada seorang tokoh agama mayoritas yang tidak peduli terhadap urusan desa. Dengan demikian, gotong royong memainkan peran sebagai perekat sosial yang melampaui batas teologi.

d. Relevansi Teori Pluralisme bagi Penelitian (Studi Kasus Desa Pendowoharjo)

Teori pluralisme memiliki peran mendasar dalam memberikan kerangka pemahaman terhadap dinamika

keberagaman di tingkat mikro seperti desa. Dalam konteks penelitian ini, pluralisme tidak ditempatkan sekadar sebagai slogan normatif tentang “hidup rukun dalam perbedaan”, melainkan sebagai pisau analisis untuk membedah bagaimana warga Desa Pendowoharjo, meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda (mayoritas Islam, minoritas Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha), mampu membangun relasi sosial yang stabil, setara, dan produktif tanpa jatuh pada konflik atau segregasi.

1) Pluralisme sebagai Fondasi Analitis Koeksistensi Sosial

Penelitian ini menggunakan teori pluralisme untuk memahami bahwa kerukunan bukanlah kondisi yang hadir secara otomatis, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang melibatkan kesadaran, kebiasaan, dan mekanisme-mekanisme informal dalam masyarakat. Dengan merujuk pada pandangan Diana L. Eck,⁵⁸ yang menekankan “*engagement*” sebagai inti pluralisme, koeksistensi di Pendowoharjo dapat dilihat bukan sekadar hidup berdampingan secara pasif, tetapi sebagai relasi aktif yang ditopang oleh perjumpaan terus-menerus dalam ruang sosial bersama.

Sementara itu, konsep *recognition* dari Charles Taylor,⁵⁹ membantu melihat apakah kelompok minoritas diakui secara simbolik dan sosial, bukan sekadar “ditoleransi”. Dalam kerangka ini, toleransi dianggap level minimal, sedangkan pluralisme baru dapat dikatakan terjadi ketika minoritas tidak hanya diterima, tetapi juga dilibatkan secara penuh dalam aktivitas kolektif dan struktur sosial desa.

Pendekatan Bhikhu Parekh tentang pluralisme sebagai dialog antar-tradisi memberikan ruang untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam mayoritas dapat berdampingan dengan nilai-nilai tradisi agama lain tanpa menghilangkan

⁵⁸ Eck, *A New Religious America...*, 2001.

⁵⁹ Taylor, *Multiculturalism and “The Politics of Recognition.”*

identitas masing-masing.⁶⁰ Hal ini sejalan dengan konsep *ukhuwah insaniyah* dan *ta'ayush silmi* (hidup berdampingan secara damai) dalam tradisi Islam, sebagaimana ditegaskan Abdulaziz Sachedina bahwa pluralisme bukanlah ancaman terhadap iman, melainkan bentuk etis dari keberagaman yang matang.⁶¹

2) Indikator Pluralisme dalam Realitas Desa

Agar teori pluralisme dapat dioperasionalkan dalam pengamatan lapangan, penelitian ini merumuskan beberapa indikator empirik yang dapat digunakan untuk menilai keberadaan dan kualitas pluralisme di Desa Pendowoharjo, antara lain:

- a) Interaksi sosial lintas agama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, keterlibatan warga lintas agama dalam kegiatan gotong royong membangun fasilitas umum, saling membantu ketika ada warga yang sakit atau meninggal, berbagi makanan saat hari raya, atau ikut hadir dalam acara kebudayaan desa meskipun diselenggarakan oleh kelompok agama tertentu. Interaksi yang alami dan repetitif menjadi tanda bahwa pluralisme hidup tidak sebatas kesepakatan konseptual, tetapi sudah menjadi *habit sosial*.
- b) Partisipasi komunal dalam struktur kelembagaan desa. Apakah warga dari agama minoritas memiliki akses terhadap ruang pengambilan keputusan seperti musyawarah RT/RW, panitia perayaan desa, kelompok ekonomi produktif, atau organisasi kepemudaan? Apakah ada pembagian peran yang setara, atautkah struktur sosial masih didominasi oleh mayoritas secara eksklusif?
- c) Absennya konflik dan hadirnya solidaritas lintas agama. Tidak adanya konflik bukan berarti pluralisme

⁶⁰ Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*.

⁶¹ Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*.

telah matang. Karena bisa jadi ketiadaan konflik menunjukkan *harmoni semu* karena minimnya interaksi. Maka perlu diuji apakah absennya konflik di Pendowoharjo disertai dengan adanya solidaritas nyata — seperti kerja sama ekonomi, penjagaan keamanan lingkungan secara bersama, atau kesediaan saling menitipkan anak saat orang tua bekerja. Solidaritas dalam situasi krisis, seperti saat pandemi atau bencana alam, juga menjadi cermin kuat dari pluralisme komunal.

- d) Representasi simbolik dan pengakuan identitas agama lain. Misalnya, apakah keberadaan rumah ibadah non-Islam diakui secara terbuka dan tidak dipersoalkan? Apakah perayaan keagamaan agama minoritas diberikan ruang dan pengawalan keamanan? Pengakuan simbolik ini penting sebagai indikator bahwa pluralisme tidak hanya berlangsung pada tataran sosial, tetapi juga pada ranah kultural dan simbolik.

3) Pluralisme sebagai Kerangka Evaluatif

Dengan menyusun indikator-indikator di atas, teori pluralisme tidak hanya menjadi latar belakang filosofis, tetapi kerangka evaluatif yang dapat diverifikasi melalui data lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak jatuh dalam romantisasi harmoni desa, tetapi secara kritis menguji apakah koeksistensi di Pendowoharjo merupakan:

- a) Pluralisme aktif, yang ditopang oleh kesadaran, keadilan relasional, dan partisipasi setara, ataukah
- b) Toleransi pasif, yaitu harmoni yang rapuh karena didasarkan pada jarak sosial dan sikap saling membiarkan tanpa keterlibatan nyata.⁶²

⁶² Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, 196–97.

Dengan menempatkan teori pluralisme sebagai alat pembacaan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi teoretik sekaligus praktis: menunjukkan bagaimana pluralisme dapat dijalankan bukan melalui wacana formal seperti forum dialog antaragama, tetapi melalui praktik komunal sehari-hari berbasis budaya lokal seperti gotong royong, sambatan, kenduri, atau ronda malam.⁶³

2. Toleransi

Hidup di suatu bangsa yang heterogen membutuhkan sikap saling menghargai dan saling menghormati atas kepercayaan orang lain baik itu suku, agama, ras, maupun bahasa. Maka dari itu dibutuhkan sikap toleran untuk hidup di tengah heterogenitas masyarakat. Kehidupan rukun dan harmonis antar sesama agama maupun etnis dapat melahirkan kebahagiaan dalam hidup. Dalam konteks keindonesiaan, terdapat beragam contoh penyikapan heterogenitas bangsa yaitu sikap toleran yang melahirkan kehidupan harmonis antar sesama pemeluk agama maupun warga negara, maupun intoleransi antar agama maupun warga negara yang berakhir konflik. Dalam KBBI *Tolerance* atau toleransi diartikan sebagai sikap yang menghargai, membiarkan, membolehkan pembiaran (pandangan kepercayaan, pendapat) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dalam kamus Webster's New American Dictionary kata toleransi diartikan sebagai memberi kebebasan dan berlaku sabar dalam menghadapi orang lain. Dalam memaknai toleransi, terdapat dua penafsiran yaitu: *Pertama*, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak meyakini orang atau suatu kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. *Kedua*, penafsiran positif yang menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pada penafsiran pertama, namun harus adanya suatu dukungan terhadap keberadaan orang lain atau sekelompok lainnya. Adapun dalam toleransi terdapat butir-butir refleksi yaitu:

- a. Kedamaian adalah suatu tujuan, toleransi merupakan metode

⁶³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 89–91.

- untuk mencapainya.
- b. Toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan.
 - c. Toleransi menghargai individu dan perbedaannya, menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama dan apa yang diwariskan.
 - d. Benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian.
 - e. Benih dari toleransi adalah cinta dan saling menghormati satu sama lainnya.
 - f. Toleransi juga berarti kemampuan untuk menghadapi situasi sulit.

Adapun unsur-unsur dari toleransi yaitu: 1) Memberikan kebebasan dan kemerdekaan, 2) Mengakui hak setiap orang, 3) Menghormati keyakinan orang lain, dan 4) saling mengerti dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, jika unsur ini dapat terlaksana dalam suatu komunitas masyarakat, maka akan mencapai kepada kehidupan yang penuh dengan kedamaian.

T.M Scanlon mengartikan toleransi sebagai sikap yang mengharuskan pemeluk agama menerima orang dan mengizinkan praktik keagamaan orang lain meski ada ketidaksetujuan di dalamnya. Dengan demikian, terdapat dualitas sikap dalam diri orang beragama. Di satu sisi ia harus bersikap menerima terhadap keyakinan orang lain, namun di sisi lain ia bersikap menolak perbedaan tersebut.⁶⁴ Hubungan antara komunitas dan emosi keagamaan akan menghasilkan ikatan primer dan solidaritas kelompok karena emosi keagamaan merupakan dasar ikatan primer dalam komunitas dan sumber sentimen kemasyarakatan, di mana kesadaran hubungan itu paling kuat dan paling mudah disinggung dan dilukai. Jadi, umat beragama mudah diprovokasi untuk konflik mengatasnamakan agama.⁶⁵

⁶⁴ T.M Scanlon, *Diffcultly of Tolerance*.

⁶⁵ Ujang Mahadi, "Membangun Kerukunan Masyarakat Beda Agama Melalui Interaksi Dan Komunikasi Harmoni Di Desa Talang Benuang Provinsi Bengkulu," *Jurnal Kajian Komunikasi* 1, no. 1 (2013): 51–58, <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n1.5>.

Seseorang dengan sikap toleran menganggap bahwa dalam kehidupannya terdapat keragaman agama maupun etnis. Sikap yang ditunjukkan atas perbedaan tersebut adalah menerima dan menghormati. Sikap umat beragama dengan agama lainnya adalah dengan cara memberi ruang umat agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dengan demikian, sikap toleransi umat beragama mengharuskan sikap lapang dada, terbuka, menerima, dan sikap hormat atas perbedaan yang ada.⁶⁶

Secara filosofis, konsepsi tentang toleransi berangkat dari asumsi dasar. Dalam hal ini Reiner Forst mengungkapkan sebuah argumentasi dasar tentang toleransi. Pertama, toleransi merupakan sikap atau perspektif yang dihadirkan ketika terjadi sebuah konflik sosial. Kedua, sikap toleran muncul dalam situasi pertentangan sosial, dengan demikian, kemunculannya selalu berhubungan dan memiliki relevansi dengan konteks sosial-historis. Ketiga, pengertian toleransi tidak menjadi kebutuhan masa konflik atau kontroversi sosial tertentu, melainkan ketidakjelasan terletak pada pengertian toleransi itu sendiri. Keempat, pendapat dan justifikasi tentang sikap toleran yang cukup beragam dan berbeda-beda.⁶⁷

Atas dasar hal ini, Forst membangun empat konsepsi tentang toleransi berdasarkan catatan historisnya. *Pertama*, memahami toleransi dalam konteks hubungan antara mayoritas dan minoritas. Konteks ini memberi pengertian bahwa toleransi merupakan suatu *permission conception*. Dengan demikian, toleransi diartikan sebagai otoritas yang diberikan secara permisif kepada minoritas untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka dengan syarat kelompok minoritas itu tetap menerima posisi kaum dominan sebagai mayoritas dan pemegang otoritas. Kedua, toleransi dipahami dari sudut pandang eksistensi kelompok sosial dengan sesama. Pandangan kedua meletakkan toleransi sebagai *coexistence conception*, atau instrumen pencegah terjadinya konflik. Konsepsi dalam rangka ko-eksistensi subjek terhadap objek toleransi, yang bukan berposisi sebagai

⁶⁶ Kemenag, *Moderasi Beragama*, 44.

⁶⁷ Forst Rainer, *Tolerance in Conflict: Past and Present* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 42

mayoritas-minoritas yang memiliki strata kuasa yang berbeda, melainkan pada relasi kesetaraan. Toleransi menjadi instrumen untuk menghindari konflik akibat satu kelompok memaksakan kehendak atau keinginannya sendiri. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah sikap saling menghormati kepentingan yang lain agar tercipta kedamaian sosial.

Ketiga, sebagai perwujudan norma-norma toleransi dan sikap toleran. Hal ini bertujuan toleransi sebagai *respect conception*, secara resiprokal untuk menghargai pemikiran, keyakinan, gaya hidup, budaya, dan standar etis orang lain. Toleransi sebagai sikap menghargai ini memiliki dua model, “*formal equality*” dan “*qualitative equality*”. Yang pertama dipakai dalam konteks hubungan antara ruang publik terhadap ruang privat, dimana keduanya harus saling menghargai, dengan penghargaan terhadap ruang publik dan terhadap ruang privat. Sedangkan model kedua dipakai dalam konteks penghargaan sesama warganegara negara dengan identitas dan karakter budaya yang berbeda tetapi menjadi warga politik yang setara. Terakhir adalah konsep toleransi dalam konteks masyarakat multikultur. Forst juga memahaminya sebagai hubungan vertikal—dalam konteks negara dan warganya, dan hubungan horizontal, yakni warga dan sesamanya. Pandangan bersifat *esteem conception* dimaknai sebagai cara menghormati anggota kelompok budaya ataupun agama.⁶⁸ Sikap toleran tidak hanya dimaknai dengan menghormati anggota kelompok budaya atau agama yang lain yang dipandang memiliki kedudukan moral dan politik yang setara, melainkan menganggap bahwa mereka memang menarik, bernilai, patut dihargai, memberikan penghargaan etis yang lebih dalam, dan memiliki pertimbangan moral yang baik. Penghargaan etis yang lebih dalam ini juga ditunjukkan dengan penerimaan secara positif terhadap pandangan yang lain, bahkan meskipun kita mengetahui bahwa pandangan itu mengandung kekurangan dan kelemahan.

Forst sendiri mendukung konsepsi *respect conception*. Konsepsi ini dibangun di atas basis pengertian, penghormatan dan penghargaan

⁶⁸ Forst Rainer, *Tolerance in Conflict: Past and Present* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 45.

terhadap yang lain, di dalam kesamaan otonomi, tetapi berbeda dalam hal identitas, keyakinan etis, pandangan moral tentang yang baik dan buruk, dan kebiasaan dalam praktik budaya mereka. Penghormatan dan penghargaan menjadi kata kunci bagi konsepsi ini. Secara politik, setiap warganegara memiliki otonomi dan kebebasan yang harus dilindungi, kesetaraan derajat, di bawah payung norma yang diterima oleh semua pihak dan tidak mendukung salah satu budaya dan komunitas tertentu. Setiap kelompok semestinya membangun toleransi bersama.

Dari konsepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa toleransi menghendaki adanya kesadaran antar umat beragama tentang pluralitas itu sendiri. Toleransi dapat diwujudkan tidak hanya mengatasi konflik, melainkan juga dapat digunakan untuk mengelola konflik. Pentingnya kesadaran posisi dalam suatu masyarakat dapat berimplikasi pada pemahaman sikap penghormatan dan penghargaan atas kelompok budaya maupun agama orang lain. Dalam konteks masyarakat di Pendowoharjo masyarakat umat beragama menyadari akan adanya pluralitas agama itu sendiri. Kesadaran ini dapat berimplikasi pada proses pengenalan satu sama lain sehingga yang mayoritas dapat mengetahui posisi mayoritasnya, dan sebaliknya. Kesadaran posisi ini dapat memberikan pengertian, penghormatan, dan penghargaan atas kelompok yang berbeda agama.

3. Koeksistensi Hidup Damai

Konsepsi teoretis kedua tentang koeksistensi digunakan untuk melengkapi konsep dari toleransi. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa konsep toleransi berhenti pada proses penghormatan maupun penghargaan atas perbedaan. Dalam suatu masyarakat yang multikultural membutuhkan lebih dari sikap penghormatan atau pengakuan karena hal tersebut masih berpotensi konflik. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya konflik, dibutuhkan sikap yang lebih dari toleransi yaitu koeksistensi agama. Toleransi diandaikan pada sikap penerimaan tanpa ada keterlibatan aktif dalam ruang kultural dan sosial. Ruang kultural dan sosial apabila melibatkan semua umat beragama dapat melahirkan hidup damai secara aktif antar

komunitas agama. Maka dari itu, tidak hanya sikap toleransi yang dibutuhkan untuk hidup di tengah masyarakat plural namun koeksistensi atau hidup damai juga menjadi prasyarat penting untuk hidup harmonis.

Istilah koeksistensi dalam Cambridge Dictionary of American English diartikan sebagai hidup bersama secara damai pada saat atau tempat yang sama.⁶⁹ Menurut Michael Walzer koeksistensi terjadi ketika masyarakat dengan kultur, sejarah, dan identitas yang berbeda hidup bersama secara damai.⁷⁰ Laporan Koeksistensi Internasional (Coexistence International Report) pada 2006 mengartikan koeksistensi sebagai “sebuah konsep yang meliputi berbagai upaya di semua lapisan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada, ketika kelompok agama maupun budaya yang berbeda berusaha hidup bersama. Praktik koeksistensi bertujuan mengubah hubungan sosial-politik, struktur dan wacana, dalam rangka meminimalisir kekerasan dan konflik struktural”.⁷¹

Keterlibatan aktif antar pemeluk umat beragama melampaui sikap toleransi itu sendiri. Jessica Berns mengatakan bahwa diperlukan sikap yang melampaui toleransi; melampaui sikap yang hanya sekedar penghormatan maupun penghargaan; melampaui sikap menghormati. Umat beragama memerlukan sikap koeksistensi yang menggabungkan kesetaraan, keragaman, dan saling ketergantungan. Koeksistensi dibuktikan dalam hubungan lintas perbedaan yang dibangun di atas rasa saling percaya, hormat, dan pengakuan, dan dipahami secara luas terkait dengan inklusi dan integrasi sosial.⁷² Dalam hal ini, pengakuan umat agama atas agama lain lebih sekedar pengakuan atas hak kelompok lain, melainkan juga menerima sebagai

⁶⁹ Aaron Tyler, *Islam, The West, and Tolerance, Conceiving Coexistence*, (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 4.

⁷⁰ Michael Walzer, *On Toleration, Castle Lectures in Ethics, Politics, and Economics* (New Haven and London: Yale University Press, 1997), h. 2.

⁷¹ Aaron Tyler, *Islam, The West, and Tolerance*, 5

⁷² Jessica Berns with Mari Fitzduff, *What is Coexistence and Why a Complementary Approach, Complementary Approaches to Coexistence Work*, Brandes University, 2007.

mitra yang sah dan setara. Contoh dari sikap ini dari aspek politik adalah kasus *Détente* antara Uni Soviet dan AS pada tahun 1970-an.

Dalam konteks hubungan antar agama, koeksistensi terwujud dalam pengakuan atas kesetaraan dan sebagai mitra. Mayoritas dan minoritas adalah fakta pluralitas yang tak terbantahkan dan ini bisa berpotensi terjadi konflik. Konflik bisa saja terjadi manakala perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik. Antara pemuka agama, pemerintah, maupun umat beragama sendiri tidak hanya menghormati dan menghargai namun hidup dalam situasi setara dan menganggap semua orang sebagai mitra. Ini mengindikasikan secara kognitif antar umat beragama menyadari posisinya yang setara di mata hukum, meski secara faktual terdapat mayoritas-minoritas dalam agama. Ini merupakan prasyarat demi terciptanya hidup damai sehingga dapat menghindari konflik.

Mayoritas dan minoritas dapat berpotensi konflik manakala masing-masing melibatkan ideologi untuk kepentingan kelompoknya. Sentimen kelompok akan melahirkan sikap antagonisme yang memandang orang lain sebagai musuh. Selain itu juga, konflik dapat muncul manakala ada kepentingan politik yang dimanfaatkan oleh para pemimpin politik untuk memobilisasi massa dari kelompoknya. Sikap ini juga dapat melahirkan perlawanan terhadap kelompok lain. Misalnya untuk kepentingan pemilihan kepala desa atau daerah, hubungan antar agama dapat bersitegang dan konflik jika dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kondisi seperti ini melahirkan sikap permusuhan terhadap kelompok lain yang disebabkan oleh kepentingan politik.

Kriesberg memberikan solusi manakala terjadi konflik seperti itu. Menurutnya ada beberapa metode yang dapat mendorong koeksistensi dan rekonsiliasi yang adil. Pertama, metode struktural. Metode ini biasanya dikeluarkan oleh pihak pemerintahan yang ditujukan untuk mengurangi ketidaksetaraan seperti memerangi diskriminasi dan tindakan afirmatif, mengembangkan ikatan lintas sektoral, dan menciptakan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, metode pengalaman. Metode ini bertujuan untuk mempromosikan perasaan subyektif dan keadaan pikiran yang mendorong koeksistensi

dan rekonsiliasi seperti upacara kultural dan reformasi kurikulum di sekolah. Ketiga, metode interpersonal. Metode ini melibatkan kerja rekonsiliasi skala kecil yang sering terjadi di tingkat akar rumput seperti kegiatan lokakarya, pertemuan antar kelompok dan interaksi tatap muka dari pihak lain.⁷³

Dalam konteks penelitian ini, konsepsi koeksistensi digunakan untuk melihat aspek hidup damai di masyarakat Pendowoharjo. Dari aspek struktural, konsep koeksistensi digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan kelurahan dalam mengelola pluralitas tersebut. Dari aspek elit agama akan dilihat bagaimana keterlibatan mereka dalam menjaga, merawat, dan mempertahankan dari kepentingan kelompoknya. Selain itu juga, koeksistensi ini juga digunakan untuk melihat bagaimana praktik hidup damai antar umat beragama di Pendowoharjo.

4. Urgensi Tafsir Agama dalam Kehidupan Beragama dan Koeksistensi Sosial

Tafsir agama menempati posisi sentral dalam kajian kehidupan beragama, karena ia menjadi medium utama yang menjembatani antara teks normatif keagamaan dan realitas sosial yang terus berubah. Agama tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan selalu dipahami, dimaknai, dan dipraktikkan melalui proses penafsiran oleh pemeluknya. Oleh karena itu, perbedaan cara beragama, sikap terhadap kelompok lain, serta pola relasi sosial antarumat beragama pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh ajaran agama itu sendiri, tetapi oleh bagaimana ajaran tersebut ditafsirkan dalam konteks sosial tertentu. Dalam konteks masyarakat plural, tafsir agama menjadi faktor kunci yang menentukan apakah agama berfungsi sebagai sumber integrasi sosial atau justru berpotensi memicu eksklusivisme dan konflik.

Dalam perspektif teoritik, tafsir agama berperan penting dalam membentuk orientasi keberagamaan masyarakat, baik yang bersifat

⁷³ Kriesberg, "Coexistence and the Reconciliation of Communal Conflict," in *The Handbook of Interethnic Coexistence*, (New York :Continuum International Publishing Group Ltd., 1998), 182.

inklusif maupun eksklusif. Tafsir yang menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan cenderung melahirkan praktik keberagaman yang toleran dan koeksistensial. Sebaliknya, tafsir yang rigid dan literalistik berpotensi membangun batas-batas sosial yang kaku dan mempersempit ruang dialog antarumat beragama. Dengan demikian, tafsir agama tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks koeksistensi kehidupan beragama, tafsir agama berfungsi sebagai landasan normatif bagi praktik toleransi dan pengelolaan perbedaan. Tafsir keagamaan yang kontekstual memungkinkan pemeluk agama untuk memahami perbedaan sebagai keniscayaan sosial yang harus dikelola secara etis, bukan dihapus atau ditolak. Hal ini relevan dengan konsep pluralisme dan toleransi yang menjadi kerangka teori penelitian ini, di mana keberagaman tidak dipandang sebagai ancaman terhadap identitas keagamaan, melainkan sebagai realitas sosial yang menuntut sikap saling menghormati dan kerja sama.

Lebih jauh, tafsir agama juga berperan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap institusi sosial lain, seperti pendidikan, ekonomi, dan politik. Tafsir yang terbuka dan adaptif cenderung mendorong partisipasi aktif umat beragama dalam ruang publik yang inklusif, sementara tafsir yang eksklusif dapat membatasi keterlibatan sosial dan memperkuat segregasi berbasis identitas. Oleh karena itu, dalam penelitian tentang koeksistensi kehidupan beragama, tafsir agama harus dipahami sebagai faktor yang berinteraksi dengan struktur sosial dan kelembagaan, bukan sebagai variabel tunggal yang berdiri sendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menempatkan tafsir agama sebagai elemen fundamental dalam menganalisis dinamika koeksistensi kehidupan beragama di Desa Pendowoharjo. Tafsir agama dipahami bukan hanya sebagai produk pemikiran keagamaan, tetapi sebagai praktik sosial yang mempengaruhi cara masyarakat membangun relasi, mengelola perbedaan, dan mencegah konflik. Penelitian ini berupaya membangun pijakan konseptual yang kuat untuk memahami

bagaimana koeksistensi dapat tumbuh dan bertahan dalam masyarakat yang plural.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian Disertasi ini adalah penelitian studi kasus (*case studies*) dan lapangan (*field study*). Studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.⁷⁴ Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.⁷⁵ Penelitian studi kasus di sini maksudnya yaitu memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung informan dengan jumlah total 32 orang dari unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Pendowoharjo.

Terpilihnya Pendowoharjo didasari atas beberapa alasan. Pertama, kehidupan masyarakat Desa Pendowoharjo mempunyai berbagai kelompok keagamaan, seperti Kristen, Hindu, Buddha dan mayoritas Islam. Model keberagaman di Desa Pendowoharjo cukup inklusif yang ditandai dengan harmonisasi interaksi sosial masyarakat agama yang satu dan lainnya saling menghargai. Inklusivitas keberagaman ini terlihat dari bangunan rumah ibadah umat Hindu yang diperoleh dari tanah wakaf umat Islam. Pola keberagaman semacam ini tentu sulit ditemukan di desa lain di Kabupaten Bantul khususnya. Kedua, alasan dipilihnya Desa Pendowoharjo karena berada di pinggiran kota, desa ini mendorong masyarakatnya menuju masyarakat perkotaan dengan menyiapkan masyarakat kelas menengah melalui basis ekonomi yang mapan.⁷⁶ Dalam kajian

⁷⁴ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 12.

⁷⁵ Indriantoro dan Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2002), 26.

⁷⁶ Muliono Muliono, "Praktik Ruang Dan Pembangunan Desa Adat: Proyeksi Ke Sebuah Model," *Journal of Social Outreach* 1, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.15548/jso.v1i1.3894>.

akademik, daerah pinggiran menjadi ladang perebutan sumber daya, penguasaan ruang-ruang ekonomi dan kelompok tertentu. Uniknya, Desa Pendowoharjo memberikan lanskap sebaliknya, di mana distribusi ekonomi tanpa konflik. Kondisi demikian mendukung adanya intervensi yang profesional yang ditandai dengan upaya demokratisasi dan akses ruang publik inklusif pada masyarakat.⁷⁷

Alasan ketiga Desa Pendowoharjo memiliki lembaga-lembaga keagamaan yang tumbuh bersama secara bersampingan satu dengan lainnya. Salah satunya tampak pada pemberian wakaf tanah untuk umat agama yang berbeda. Bahkan di desa ini ada kelompok keagamaan dari golongan tradisional pesantren yang berafiliasi dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Hadirnya lembaga pesantren menjadi ruang transfer pemahaman dan memberi tafsir keagamaan terutama keislaman yang dikontekstualisasi pada kehidupan masyarakat Desa Pendowoharjo, sehingga mampu merawat dan melestarikan koeksistensi agama dalam lingkup masyarakat Pendowoharjo. Selain hal itu, aktifnya pemerintah dalam bentuk intervensi kebijakan di desa ini tampak sudah memiliki perencanaan yang serius karena dalam konteks ini kebijakan politik menjadi alasan yang cukup signifikan bagi penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Proses penelitian ini melibatkan beberapa upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema umum, dan menafsirkan makna data.

⁷⁷ Zubaedi, "*Buku Pengembangan Masyarakat*" (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013). 14-18.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah mengenai praktik hidup koeksistensi umat beragama di Desa Pendowoharjo dalam konteks masyarakat yang beragam, pinggiran kota, dan intervensi negara dan ekonomi masyarakat. Data-data berkaitan dengan hal tersebut digali dari berbagai informan serta hasil bacaan terhadap berbagai sumber data lapangan yang tersedia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan *In-depth interview*.⁷⁸

Melalui observasi peneliti menemukan gambaran mendalam, seperti kerukunan umat beragama, interaksi masyarakat plural, dan demokratisasi ruang publik serta tafsir keagamaan dalam konteks budaya yang bisa memberikan nafas eksistensi agama-agama untuk saling menjaga satu dan lainnya. Dalam konteks tersebut, peneliti banyak menetap di Desa Pendowoharjo, mengikuti kegiatan masyarakat dan mengobservasi keseharian warga. Melalui teknik dokumentasi, peneliti memperoleh data-data terkait terutama yang bersumber dari dokumen-dokumen kebijakan pemerintah, monografi desa, kitab-kitab penting yang menjadi bahan kejian keagamaan dalam membangun koeksistensi, hingga pada foto-foto kerukunan umat beragama Pendowoharjo.

Adapun metode *in-depth interview* dilakukan terhadap para informan kunci, yang meliputi aparat pemerintah sebanyak 8 orang meliputi Lurah, Kamituwo dan Aparatur Desa Pendowoharjo serta Pembimas Islam, Hindu, Budha, Kristen dan Katolik, tokoh agama sebanyak 3 orang meliputi organisasi NU dan Muhammadiyah, tokoh masyarakat sebanyak 2 orang, dan masyarakat sebanyak 38 orang terdiri dari berbagai agama di Desa Pendowoharjo. Total keseluruhan informan penelitian ini yaitu sejumlah 51 orang. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada posisi mereka yang memiliki pengaruh dan keterlibatan langsung dalam dinamika sosial keagamaan di Desa Pendowoharjo. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat umum untuk memperoleh pandangan yang lebih luas

⁷⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021).

mengenai kehidupan sosial dan keagamaan di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaan wawancara, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti.⁷⁹ Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* karena penelitian ini berupaya untuk tidak melakukan generalisasi.⁸⁰

Pemilihan teknik *purposive sampling* didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti telah memahami konteks sosial masyarakat Pendowoharjo, sehingga mampu menentukan informan secara selektif sesuai dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, posisi sosial, aktivitas, dan pengaruh mereka dalam komunitas. Proses wawancara mendalam menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang memuat daftar pertanyaan relevan dengan fokus kajian. Dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak hanya melakukan wawancara formal, tetapi juga melakukan wawancara informal dengan masyarakat setempat menggunakan bahasa Jawa agar komunikasi berlangsung lebih natural dan mendalam.

3. Teknis Analisis Data

Data penelitian koeksistensi masyarakat Desa Pendowoharjo dipaparkan secara deskriptif kualitatif dan interpretatif. Semua data yang diperoleh dari hasil observasi dengan wawancara dan dokumentasi dipaparkan secara sistematis.⁸¹ Proses pemaparan dilakukan dengan mengutamakan kerja-kerja etik untuk menunjukkan orisinalitas data serta teori yang dijadikan sebagai pisau analisis terkait dengan temuan lapangan. Sedangkan istilah-istilah yang kemudian muncul akan dijabarkan dalam pembahasan yang lebih spesifik dan akademik. Penjelasan tentang koeksistensi keberagaman masyarakat Pendowoharjo akan mengutamakan *native point of view* supaya tidak tampak pandangan peneliti mendominasi di dalamnya.

⁷⁹ Neetij Rai and Bikash Thapa, "A Study on Purposive Sampling Method in Research," *Kathmandu: Kathmandu School of Law* 5 (2015).

⁸⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), 85.

⁸¹ Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*, 62.

Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.⁸² Hal ini karena metode teknik yang diberikan tampak sangat jelas dan memudahkan peneliti dalam menginterpretasi dan menyajikan data. Dalam metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman terdapat tiga langkah taktis dalam analisis data; pertama, Reduksi data. Sebelum melakukan reduksi sudah barang tentu peneliti telah mengumpulkan data melalui metode yang sudah dideskripsikan dalam sub bab sebelumnya. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dipilah-pilah, dipusatkan dan mengabstraksi data-data yang sudah peneliti kumpulkan. Reduksi dalam konteks ini dilakukan karena berupaya mengelompokkan mengoneksikan data-data yang ada untuk menjawab rumsana penelitian.

Kedua, Verifikasi data. Data yang sudah direduksi, dilakukan verifikasi kembali terutama dalam konteks keterkaitannya dengan data lain, penguatan satu data dengan data yang lain, dan berusaha kemudian dipetakan dalam bentuk diagram sehingga data tampak sudah memiliki pola yang terhubung satu dengan yang lain.⁸³ Ketiga, penyajian data. Data-data yang sudah dikondensasi dan diverifikasi disusun dengan baik dan mulai diinterpretasi dengan menggunakan logika konsep teoritis yang sudah peneliti uraikan. Dengan demikian sudah ada dialog dengan konsep teoritis memungkinkan data dapat berbicara secara lebih mendalam dan mengarahkan peneliti pada pengambilan kesimpulan. Keempat, penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil diarahkan untuk menjawab rumusan penelitian dan mengabstraksi dengan konsep keilmuan. Sehingga dengan demikian, kesimpulan tampak teoritis, koheren dan abstraktif.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini ditulis dalam lima bab yang disusun secara sistematis serta utuh sebagai berikut: Bab pertama dengan pembukaan singkat mengenai problem-problem akademik yang dihadapinya.

⁸² Mathew B Miles and A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1992).

⁸³ Moh Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama: Kualitatif* (Yogyakarta: SUKA Press, 2018). 43.

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengapa peneliti memilih riset tentang koeksistensi damai Desa Pendowoharjo serta bagaimana rasionalisasi pelaksanaan penelitian ini baik secara teoritis maupun metodologis. Selanjutnya disampaikan tujuan dan manfaat dari hasil penelitian serta rancangan pembahasan dalam penelitian. Kemudian sejumlah penelitian terdahulu dirangkum dalam kajian pustaka dan dijabarkan tentang kerangka teori untuk menelaah realitas koeksistensi masyarakat beragama, dengan teori toleransi dan koeksistensi hidup damai. Dan bab pertama diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua menjelaskan mengenai perubahan dasar (metamorfosa) Desa Pendowoharjo sebagai lokus penelitian. Selanjutnya di bab ini akan diulas mengenai bentuk-bentuk koeksistensi dari agama-agama yang ada di Pendowoharjo. Dalam bab ini peneliti akan lebih dalam menghadirkan sekaligus menjabarkan secara utuh bangunan koeksistensi keberagamaan masyarakat Desa Pendowoharjo. Bab ketiga: membahas peran penting pemahaman tentang tafsir agama, peran penting lembaga-lembaga pendidikan, peran penting lembaga ekonomi, dan peran penting lembaga-lembaga politik. Pada bab ini hadirnya lembaga keagamaan seperti pesantren yang diwakili organisasi Nadlatul Ulama dijabarkan secara utuh peran dan model dakwahnya dalam mendukung koeksistensi agama Desa Pendowoharjo. Serta lembaga-lembaga pemerintah yang hadir turut memberikan warna pada kehidupan masyarakat.

Bab keempat akan membahas fenomena tentang alasan/dorongan apa yang menyebabkan seseorang yang berlainan agama memberikan fasilitas tanah untuk tempat ibadah agama lain. Dalam bab keempat secara detail mengulas terkait dengan motivasi dan gerakan inklusivitas masyarakat yang hidup di ruang plural. Salah satunya dengan adanya pemberian tanah wakaf dari kelompok keagamaan yang berbeda dengan kelompoknya. Bab kelima Penutup berisi kesimpulan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini serta rekomendasi untuk penelitian lanjutan yang berkenaan dengan topik dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari disertasi yang memuat kesimpulan dan saran hasil penelitian mengenai koeksistensi keberagaman di Desa Pendowoharjo Yogyakarta. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan-temuan utama yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, baik yang bersifat konseptual maupun empiris, untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara menyeluruh.

Sementara itu, bagian saran memuat berbagai rekomendasi yang bersumber dari hasil analisis lapangan dan refleksi teoritis. Saran tersebut ditujukan bagi berbagai pihak, terutama masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan pemerintah, agar dapat menjadi masukan dalam memperkuat praktik koeksistensi dan moderasi beragama di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, bab ini menutup keseluruhan pembahasan dengan menegaskan kontribusi akademik dan praktis dari penelitian ini terhadap pengembangan studi sosial-keagamaan di Indonesia.

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Pendowoharjo telah berhasil membangun koeksistensi keberagaman dalam kehidupan sosial mereka dengan sangat baik. Mereka hidup berdampingan secara rukun dan damai, tanpa adanya perpecahan maupun konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini tumbuh dari nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi toleransi dan gotong royong, serta didukung oleh peran aktif pemerintah setempat. Pemerintah desa maupun daerah memegang peran penting dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Pendekatan inklusif ini membuat setiap warga merasa dihargai dan memiliki ruang untuk menjalankan keyakinannya

masing-masing. Selain itu, peran tokoh lintas agama juga sangat signifikan dalam menjaga koeksistensi ini. Para tokoh agama aktif dalam membina masyarakat, tidak hanya dalam hal keagamaan, tetapi juga dalam mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerukunan antarumat beragama. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan tokoh agama ini, Pendowoharjo menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan dapat menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Koeksistensi yang terbangun di sana menjadi fondasi kuat bagi kehidupan sosial yang harmonis dan damai.

2. Tafsir agama dan pengetahuan keagamaan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk koeksistensi keberagaman di masyarakat Pendowoharjo. Pemahaman ajaran agama yang dikontekskan secara terbuka dan inklusif telah menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang damai, toleran, dan harmonis. Masyarakat Pendowoharjo tidak melihat perbedaan agama sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan yang harus dijaga bersama. Dalam konteks pendidikan, setiap agama memiliki lembaga pendidikan keagamaan sendiri yang berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan kedamaian sejak usia dini. Misalnya, dalam agama Hindu terdapat Pasraman, tempat pembelajaran spiritual dan etika Hindu; dalam agama Kristen terdapat Seminari, sebagai wadah pendidikan iman; dalam agama Buddha ada Pasastrian Buddhis Kusalamitra yang mengajarkan nilai-nilai welas asih dan kedamaian; sedangkan dalam agama Islam terdapat Madrasah Diniyah dan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan toleransi antarumat. Lembaga-lembaga pendidikan ini tidak hanya membentuk karakter keagamaan masing-masing individu, tetapi juga memainkan peran dalam membangun dialog dan pemahaman lintas agama yang konstruktif. Kolaborasi antarlembaga keagamaan ini turut memperkuat ikatan sosial di Desa Pendowoharjo, menjadikan perbedaan sebagai dasar untuk bersatu, bukan berpisah.

Jika ditinjau dari aspek politik, Pemerintah Desa Pendowoharjo memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan ruang demokratisasi untuk mendukung koeksistensi keberagamaan. Melalui kebijakan yang inklusif dan tanpa diskriminasi, pemerintah desa memastikan bahwa setiap warga apapun latar belakang agamanya, memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Intervensi pemerintah terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang adil, pelayanan publik yang setara, serta dukungan terhadap kegiatan lintas agama. Pemerintah juga aktif mendorong dialog dan kolaborasi antarumat beragama, menciptakan ruang pertemuan yang terbuka dan demokratis bagi semua kelompok.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa Pendowoharjo diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kebijakan inklusif yang telah dibangun, khususnya dalam mendukung ruang-ruang dialog lintas agama dan kegiatan bersama antarumat beragama. Diperlukan penguatan program-program berbasis komunitas yang melibatkan semua kelompok agama secara aktif, serta dukungan terhadap lembaga-lembaga keagamaan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan perdamaian.
2. Kepada masyarakat, diharapkan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan, saling menghormati, dan toleransi antarumat beragama. Sikap saling memahami dan terbuka terhadap perbedaan harus tetap dijaga sebagai kekuatan bersama. Partisipasi aktif dalam kegiatan lintas agama, serta sikap gotong royong tanpa memandang latar belakang keyakinan, merupakan wujud nyata dari semangat koeksistensi yang sudah terbangun. Dengan begitu, kedamaian dan keharmonisan sosial di Pendowoharjo akan terus terjaga dan menjadi contoh positif bagi daerah lainnya.

C. Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai koeksistensi keberagaman masyarakat Desa Pendowoharjo yang ditopang oleh integrasi faktor sosial, budaya, ekonomi, peran tokoh agama, serta kebijakan lokal yang inklusif, maka terdapat sejumlah peluang pengembangan kajian yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

1. Penelitian lanjutan perlu mengembangkan pendekatan komparatif antarwilayah. Disertasi ini menunjukkan bahwa koeksistensi keberagaman di Pendowoharjo sangat dipengaruhi oleh kekuatan budaya lokal, struktur sosial yang relatif stabil, serta dominasi penduduk asli. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat membandingkan model koeksistensi di desa dengan karakter serupa dan desa dengan tingkat urbanisasi tinggi, mobilitas penduduk yang intens, atau konflik laten yang lebih kuat. Pendekatan komparatif ini penting untuk menguji sejauh mana temuan penelitian ini bersifat kontekstual atau memiliki daya jelajah teoritis yang lebih luas dalam studi keberagaman masyarakat multikultural.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam kajian tentang peran generasi muda dalam merawat koeksistensi keberagaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai toleransi dan hidup rukun diwariskan melalui tradisi, budaya, dan keteladanan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Namun demikian, dinamika sosial kontemporer, terutama pengaruh media digital, globalisasi ideologi keagamaan, dan perubahan pola interaksi sosial, berpotensi memengaruhi cara generasi muda memaknai keberagaman dan relasi lintas iman. Oleh sebab itu, kajian yang berfokus pada persepsi, praktik, dan tantangan generasi muda dalam konteks koeksistensi keberagaman menjadi sangat relevan untuk menjamin keberlanjutan harmoni sosial di masa depan.
3. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan analisis lebih mendalam mengenai peran lembaga keagamaan secara institusional, khususnya organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lembaga lintas iman

lainnya, dalam membangun dan mereproduksi nilai-nilai koeksistensi. Disertasi ini telah menunjukkan kontribusi signifikan lembaga keagamaan dalam dakwah moderat, pendidikan toleransi, dan penguatan relasi sosial. Namun, penelitian selanjutnya dapat menelaah secara lebih spesifik strategi kelembagaan, kurikulum dakwah, pola kaderisasi, serta relasi antara lembaga keagamaan dan negara dalam konteks pengelolaan pluralitas keagamaan.

4. Penelitian berikutnya disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan kebijakan publik dan tata kelola multikultural. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan koeksistensi keberagaman di Pendowoharjo tidak terlepas dari kebijakan desa dan peran pemerintah yang bersifat adil, inklusif, serta tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, kajian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam bagaimana desain kebijakan lokal, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat direplikasi atau diadaptasi di wilayah lain dengan tingkat keragaman yang berbeda.
5. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti penggunaan metode etnografi jangka panjang, participatory action research (PAR), atau pendekatan kuantitatif-kualitatif (mixed methods). Disertasi ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif yang menekankan kedalaman data dan perspektif *native point of view*. Pengayaan metodologis akan memungkinkan peneliti selanjutnya untuk menangkap dinamika koeksistensi keberagaman secara lebih longitudinal, sekaligus mengukur dampak sosial koeksistensi terhadap kesejahteraan, stabilitas sosial, dan ketahanan masyarakat multikultural.

Dengan demikian, rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pijakan akademik bagi penelitian selanjutnya dalam memperluas, memperdalam, dan mengembangkan kajian koeksistensi keberagaman, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global,

sekaligus memperkuat kontribusi keilmuan dalam studi sosiologi agama dan kajian multikulturalisme di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifiddin, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Abas, Muh, and Pendais Haq. “Indeks Kerukunan Umat Beragama Di Kota Kendari Ditinjau Dari Aspek Hubungan Sosial, Hubungan Keagamaan, Nilai, Dan Peran Pemerintah.” *Historical Education Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2016).
- Abu-Nimer, Mohammed. “Religion, Dialogue, and Non-Violent Actions in Palestinian-Israeli Conflict.” *International Journal of Politics, Culture, and Society* 17 (2004): 491–511.
- Akmaliah, Wahyudi. “The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 1 (2020): 1–24.
- Al Jabouri, Ali Aboudi Nehme, and Nagham Hamid Al-Yasiri. “Marketing Religious Tolerance and Its Role in Peaceful Coexistence between Religions and Its Impact on the Local Economy Is an Applied Study in Iraq.” *Ishtar Journal of Economics and Business Studies (IJEBS)* 3, no. 1 (2022): 1–14.
- Assegaf, Abd. “Gerakan Transnasional Islam Dan Globalisasi Salafi Di Islamic Center Bin Baz Yogyakarta.” *Millah* 16, no. 02 (2017): 147–72.
- Aziz, Abd Faiz. *Dasar-Dasar Dan Pokok Pikiran Sosiologi Agama*. SUKA-Press, 2021.
- Al-Tirmidzi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Kitab al-Manaqib, Hadis no. 3926. Disahihkan oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, no. 3277.

- Al-Sakhawi, Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman. *Al-Maqashid al-Hasanah fi Bayan Kathir min al-Ahadith al-Musytahirah 'ala al-Asinah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Baharun, Hasan, and Robiatul Awwaliyah. "Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi Narasi Islamisme Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 5, no. 2 (2017): 224–43.
- Basudoro, Purnawan. "Ringkasan Disertasi Rakyat Miskin Dan Perebutan Ruang Kota Di Surabaya Tahun 1900–1960-An." *Masyarakat Indonesia* 38, no. 2 (2017): 427–57.
- Beaman, Lori G. "Battles over Symbols: The 'Religion' of the Minority versus the 'Culture' of the Majority." *Journal of Law and Religion* 28, no. 1 (2013): 67–104.
- Beck, Herman L. "A Pillar of Social Harmony: The Study of Comparative Religion in Contemporary Indonesia." In *Modern Societies & the Science of Religions*, Brill, 2002. 331–49.
- Berger, Peter L. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. Open Road Media, 2011.
- Chumairah, Siti Maharani, and Ridho Al-Hamdi. "Dinamika Toleransi Di Kota Besar Indonesia: Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan City of Tolerance." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 9, no. 2 (2019): 175–83.
- Dippel, Christian. "Forced Coexistence and Economic Development: Evidence from Native American Reservations." *Econometrica* 82, no. 6 (2014): 2131–65.
- Dahlan, Ahmad. *Sejarah Muhammadiyah dan Peranannya dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Muhammadiyah, 2010.
- Elison, John. "The Role of Religious Education in Promoting Peace and Tolerance." *International Journal of Educational Development* 19, no. 3 (2015): 234–45.

- Effendy, Bahtiar. *Islam and the State in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Eichenberger, Reiner, and Felix Oberholzer-Gee. "Rational Moralists: The Role of Fairness in Democratic Economic Politics." *Public Choice* 94, no. 1 (January 1, 1998): 191–210. <https://doi.org/10.1023/A:1004961414101>.
- Eck, Diana L. *A New Religious America: How a "Christian Country" Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation*. San Francisco: Harper San Francisco, 2001.
- . *A New Religious America: How a "Christian Country" Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation*. New York: HarperCollins, 2001.
- Fox, Jonathan, Patrick James, and Yitan Li. "Religious Affinities and International Intervention in Ethnic Conflicts in the Middle East and Beyond." *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne de Science Politique* 42, no. 1 (2009): 161–86.
- Ghumman, Sonia, Ann Marie Ryan, Lizabeth A. Barclay, and Karen S. Markel. "Religious Discrimination in the Workplace: A Review and Examination of Current and Future Trends." *Journal of Business and Psychology* 28 (2013): 439–54.
- Gressgård, Randi. *Multicultural Dialogue: Dilemmas, Paradoxes, Conflicts*. Berghahn Books, 2022.
- Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 183–186.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Hilmy Pratomo, Transformasi Metode Bahtsul Masail Nu Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an, *Jurnal Lektur Keagamaan (18) no. 1, 2020*, 109-134

- Hepple, Bob, and Tufyal Choudhury. "Tackling Religious Discrimination: Practical Implications for Policy-Makers and Legislators," 2001.
- Hasyim Asy'ari, KH. *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama*. Tebuireng: Maktabah al-Nahdliyah, 1926.
- Hunter, Shireen T. *The Future of Islam and the West: Clash of Civilizations or Peaceful Coexistence?* Bloomsbury Publishing USA, 1998.
- Hick, John. *God and the Universe of Faiths*. London: Macmillan, 1973.
- Indrawati, Dewi. "Analisis Implementasi Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa (Studi Pada Desa Panggunharjo Dan Desa Pendowoharjo Kabupaten Bantul)." Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Izzah, Lathifatul, Misyrah Ahmadi, and Kurniati Kurniati. "The Map of The Religious Elite Conflict and Resolution Effort." *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19 (2021): 236–68.
- Indriantoro, dan Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002.
- Ismail, Arifuddin. "Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama." *Jurnal Analisa* 17, no. 2 (2012): 175–86.
- Kamil, Muhammad. "Cultural Tolerance, Diversity and Pluralism: The Recognition of Yogyakarta as the City of Tolerance." *LOGOS (Journal of Local Government Issues)* 1, no. 1 (2018): 85–104.
- Kawangung, Yudhi. "Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia." *International Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2019): 160–70.

- Kunst, Jonas R., Talieh Sadeghi, Hajra Tahir, David Sam, and Lotte Thomsen. "The Vicious Circle of Religious Prejudice: Islamophobia Makes the Acculturation Attitudes of Majority and Minority Members Clash." *European Journal of Social Psychology* 46, no. 2 (2016): 249–59.
- Kartodirdjo, D. S. *Peran Muhammadiyah dalam Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Ikhlash, 2015.
- Knitter, Paul F. *Introducing Theologies of Religions*. Maryknoll: Orbis Books, 2002.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Locke, John. *A Letter Concerning Toleration*. Diedit oleh James Tully. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1983.
- Legare, Cristine H., E. Margaret Evans, Karl S. Rosengren, and Paul L. Harris. "The Coexistence of Natural and Supernatural Explanations across Cultures and Development." *Child Development* 83, no. 3 (2012): 779–93.
- Maherul, Mursal. "Mengenal Ekonomi Politik: Definisi, Posisi Negara, Dan Pasar," December 15, 2019.
- Matevska, Dushka. "The Relationship between the Political and Religious Elite in Contemporary Macedonian Society." *Politics and Religion Journal* 5, no. 1 (2011): 129–40.
- Meintel, Deirdre, and Géraldine Mossière. "In the Wake of the Quiet Revolution: From Secularization to Religious Cosmopolitanism." *Anthropologica*, 2013, 57–71.
- Mibtadin, Mibtadin, and Fathol Hedi. "Masjid, Khutbah Jumat, Dan Konstruksi Realitas Keagamaan Di Ruang Publik: Studi Tentang Materi Khutbah Jumat Di Masjid-Masjid Kota Surakarta." *Jurnal Ilmu Dakwah* 40, no. 1 (2020): 40–53.
- Miles, Mathew B, and A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1992.

- Moyser, George. "Politics and Religion in the Modern World: An Overview." In *Politics and Religion in the Modern World*. Routledge, 1991.
- Muliono, Muliono. "Praktik Ruang Dan Pembangunan Desa Adat: Proyeksi Ke Sebuah Model." *Journal of Social Outreach* 1, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.15548/jso.v1i1.3894>.
- Mahadi, Ujang. "Membangun Kerukunan Masyarakat Beda Agama Melalui Interaksi Dan Komunikasi Harmoni Di Desa Talang Benuang Provinsi Bengkulu." *Jurnal Kajian Komunikasi* 1, no. 1 (2013): 51–58. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n1.5>.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhdina, Darwis. "Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar." *Diskursus Islam* 3, no. 1 (2015): 20–36.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Modood, Tariq. *Multiculturalism: A Civic Idea*. Cambridge: Polity Press, 2007.
- Ogbuehi, Friday I. "Critical Appraisal of Dialogue as a Strategy for Religious Conflict Resolution in Nigeria." *UNIZIK Journal of Religion and Human Relations* 8, no. 2 (2016): 158–74.
- Priyani, Ismaya Dewi. "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Pemotongan Nisan Salib Di Kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta." *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021): 85–100.
- Putra, Ahmad, and Sartika Suryadinata. "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber." *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2020).

- Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. London: Palgrave Macmillan, 2006.
- Rai, Neetij, and Bikash Thapa. "A Study on Purposive Sampling Method in Research." *Kathmandu: Kathmandu School of Law* 5 (2015).
- Rovisco, Maria, and Sebastian Kim. *Cosmopolitanism, Religion and the Public Sphere*. Routledge, 2014.
- Rowatt, Wade C., Tom Carpenter, and Megan Haggard. "Religion, Prejudice, and Intergroup Relations." *Religion, Personality, and Social Behavior*, 2013, 180–202.
- Rusydiyah, Evi Fatimatur. "Konstruksi Sosial Pendidikan Pesantren: Analisis Pemikiran Azyumardi Azra." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2017): 21–43.
- Safei, Agus Ahmad. "Toleransi Beragama Di Era 'Bandung Juara.'" *Kalam* 10, no. 2 (2016): 403–22.
- Sachedina, Abdulaziz. *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Saifuddin, Saifuddin. "Kekerasan Atas Nama Tuhan (Studi Kasus Kekerasan FPI Yogyakarta)." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (n.d.).
- Santoso, Arif Gunawan, Deden Istiawan, and Laelatul Khikmah. "Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Kalimantan Barat." *Intizar* 28, no. 2 (2022): 70–84.
- Searle, Peter. "Ethno-Religious Conflicts: Rise or Decline? Recent Developments in Southeast Asia." *Contemporary Southeast Asia*, 2002, 1–11.
- Shagan, Ethan H. *The Rule of Moderation: Violence, Religion and the Politics of Restraint in Early Modern England*. Cambridge University Press, 2011.

- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama: Kualitatif*. Yogyakarta: SUKA Press, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2007.
- Sukestiyarno, Sukestiyarno, Sugiyana Sugiyana, Muhammad Sulthon, Wuriningsih Wuriningsih, and Hartutik Hartutik. "Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Ditinjau Dari Dimensi Moderasi Beragama." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 8, no. 2 (2022): 177–90.
- Sumbulah, Umi. "Islam and Freedom of Religion: Religious Elites Perspectives in Malang, East Java, Indonesia." *IOSR Journal of Humanities And Social Science* 21, no. 6 (2016): 95–102.
- Svensson, Isak. "One God, Many Wars: Religious Dimensions of Armed Conflict in the Middle East and North Africa." *Civil Wars* 15, no. 4 (2013): 411–30.
- Salim, Delmus Puneri. "Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama Di Indonesia." *Jurnal Potret: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2017): 15–34. <https://doi.org/10.30984/pp.v2i2.741>.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Todorov, Tzvetan. "The Coexistence of Cultures." In *Diasporic Philosophy and Counter-Education*, 223–32. Brill, 2010.
- Tracy, David. *Dialogue with the Other: The Inter-Religious Dialogue*. Vol. 1. Peeters Publishers, 1990.
- Trepl, Ludwig. "Competition and Coexistence: On the Historical Background in Ecology and the Influence of Economy and Social Sciences." *Ecological Modelling* 75 (1994): 99–110.
- Taylor, Charles. *Multiculturalism and "The Politics of Recognition."* Edited by Amy Gutmann. Princeton: Princeton University Press, 1992.

- Ufie, Agustinus, Shermine Oruh, and Andi Agustang. "Maintaining Social Harmony Through Historical Learning Based on Local Wisdom of Indigenous Peoples in Maluku." *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 5, no. 1 (2021): 27–36.
- Vertovec, Steven. "Super-Diversity and Its Implications." *Ethnic and Racial Studies* 30, no. 6 (2007): 1025–1054.
- Wahid, Abdurrahman. *Dari Pesantren ke Gedung Negara*. Jakarta: Kompas, 2009.
- . *Gus Dur: Islam, Pluralisme, dan Kemanusiaan*. Jakarta: Mizan, 2005.
- Zainuddin, M. "The Social Construction of Religious Elite on Pluralisme and Interreligious Dialogue in Malang Indonesia." *Journal of Islamic Knowledge* 1, no. 2 (2012): 13–21.
- Zubaedi. "BUKU PENGEMBANGAN MASYARAKAT (1).Pdf." Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2013.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. Vol. 1999. Syakir Media Press, 2021.